



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

INSPEKTORAT

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Inspektorat dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 17 Januari 2025

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM
NIP. 196812311989031065

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD	5
2.1 Kebijakan Keuangan.....	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	8
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	26

5.1	Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
5.3	Pos-pos Neraca.....	32
5.2	Pos-pos Laporan Operasional	35
5.5	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		40
6.1	Gambaran Umum OPD.....	40
6.2	Sumber Daya Inspektorat.....	40
BAB VII PENUTUP.....		46
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024	5
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024...	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Inspektorat Tahun 2024	7
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	8
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	26
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	26
Tabel 5.12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	27
Tabel 5.13 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	28
Tabel 5.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	29
Tabel 5.15 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29
Tabel 5.21 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	31
Tabel 5.30 Rincian Aset	32
Tabel 5.30 Rincian Aset Lancar.....	32
Tabel 5.50 Persediaan	33
Tabel 5.52 Daftar Nilai Aset Tetap.....	33
Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	33
Tabel 5.56 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	34
Tabel 5.70 Rincian Utang Belanja Pegawai	34
Tabel 5.93 Rincian Beban Operasional	35
Tabel 5.94 Rincian Beban Pegawai	35
Tabel 5.95 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	36
Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa.....	36
Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO.....	37
Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	38
Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) - LO	38
Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO	39
Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO.....	39
Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)

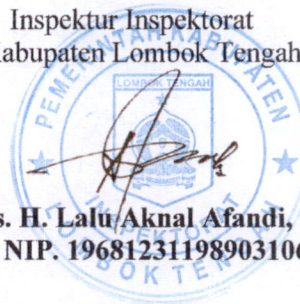
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 17 Januari 2025

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP. 196812311989031065



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	0,00	14.461.368.085,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	0,00	14.097.196.085,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.661.762.659,00	11.574.793.825,00	0,00	10.564.214.417,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.619.731,00	6.195.565.104,00		5.755.858.870,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00		4.804.743.547,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.812.000,00	4.812.000,00		3.612.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.005.016.148,00	3.895.646.881,00	0,00	3.532.981.668,00
5.1.02.01	Belanja Barang	737.762.808,00	716.296.900,00		552.769.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.004.340,00	644.674.610,00		582.163.604,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	59.460.000,00	59.150.000,00		32.999.545,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.534.789.000,00	2.475.525.371,00		2.365.049.269,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	0,00	14.097.196.085,00
5.2	BELANJA MODAL	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00		253.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00		68.614.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	52.702.832,00	51.750.000,00		5.058.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	69.795.075,00	67.628.400,00		37.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	0,00	14.461.368.085,00
	SURPLUS/DEFISIT	-15.881.892.164,00	-15.682.319.106,00	0,00	-14.461.368.085,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00		0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-15.881.892.164,00	-15.682.319.106,00	0,00	-14.461.368.085,00

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024

Kepala Inspektorat

Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP. 19612311989031065



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1	796.224.055,00	908.710.650,00
ASET LANCAR	5.3.1.1	454.000,00	737.000,00
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	-
Persediaan	5.3.1.1.5	454.000,00	737.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3	795.770.055,00	907.973.650,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	4.233.680.769,75	4.021.802.369,75
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	940.000,00	940.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.438.850.714,75)	(3.114.768.719,75)
KEWAJIBAN	5.3.2	383.355.891,00	401.502.637,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	383.355.891,00	401.502.637,00
Utang Belanja dan transfer	5.3.2.1.5	383.355.891,00	401.502.637,00
EKUITAS	5.3.3	412.868.164,00	507.208.013,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		796.224.055,00	908.710.650,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Praya, 17 Januari 2025
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP. 196812311989031065



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
BEBAN DAERAH	5.4.2	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44	1.254.794.527,56	8,64
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44	1.254.794.527,56	8,64
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	11.555.447.079,00	10.629.569.192,00	925.877.887,00	8,71
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	3.897.129.881,00	3.533.238.068,00	363.891.813,00	10,30
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	324.081.995,00	359.057.167,44	(34.975.172,44)	(9,74)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(15.776.658.955,00)	14.521.864.427,44	(1.254.794.527,56)	8,64
SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.7	(15.776.658.955,00)	14.521.864.427,44	(1.254.794.527,56)	8,64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Praya, 17 Januari 2025
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP. 196812311989031065





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	REF KALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	507.208.013,00	639.073.674,44
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	- 15.776.658.955,00	- 14.521.864.427,44
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	5.6.3.1	-	-
	Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.2	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.3	-	-
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.4	-	-
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.5	-	-
4	RK PPKD	5.6.3	15.682.319.106,00	14.389.998.766,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	412.868.164,00	507.208.013,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Praya, 17 Januari 2025
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah
Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM
NIP. 196812311989031065



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
II	Belanja	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	1.435.688.391,00	9,16
1	Belanja Pegawai	10.282.131.345,00	11.660.562.659,00	1.378.431.314,00	11,82
2	Belanja Barang dan Jasa	3.948.959.071,00	4.006.216.148,00	57.257.077,00	1,43
3	Belanja Modal	174.045.443,00	215.113.357,00	41.067.914,00	19,09
	Jumlah Belanja	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	1.435.688.391,00	9,16
	Deficit/Surplus	(14.231.090.416,00)	(15.666.778.807,00)	(1.435.688.391,00)	(9,16)

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Lebih selektif dalam penggunaan anggaran
 - b. Melakukan pergeseran alokasi belanja untuk memenuhi target kinerja yang belum terakomodir dalam APBD Murni Tahun 2024

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Terdapat penugasan mandatory di tengah pelaksanaan regular yang harus segera diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- b. Terdapat beberapa kegiatan mandatory yang diarahkan ditengah tahun anggaran.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Tujuan Program ini untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan dua kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp2.692.983.215,00 terealisasi senilai Rp2.645.256.024,00 atau 98,23%

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tujuan Program ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan benar, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp744.633.644,00 terealisasi senilai Rp730.435.930,00 atau 98,09%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	14.231.090.416,00	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	98,75
1.1	Belanja Pegawai	10.282.131.345,00	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	99,25
1.2	Belanja Barang	3.948.959.071,00	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	97,27
2	Belanja Modal	174.045.443,00	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	174.045.443,00	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50
	Jumlah Belanja	14.405.135.859,00	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp15.682.319.106,00 atau 98,74%, disebabkan karena adanya beberapa belanja yang SSH nya lebih besar dibandingkan dengan harga rilnya.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program A		2.692.983.215,00	2.645.256.024,00	98,23
1	Kegiatan A.1	Input : dana	2.219.690.333,00	2.186.528.024,00	98,51
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%
2	Kegiatan A.2	Input : dana	473.292.882,00	458.728.000,00	96,92
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%
II	Program B		744.633.644,00	730.435.930,00	98,09
1	Kegiatan B.1	Input : dana	744.633.644,00	730.435.930,00	98,09
		Output :	100%	100%	100%
		Outcome :	100%	100%	100%

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Insektorat Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
B	BELANJA					
1	Belanja Daerah	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	7,79
	Jumlah Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4-5)/4*100
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	10.564.214.417,00	99,25	8,72
2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	3.532.981.668,00	97,27	9,34
3	Belanja Modal	215.113.357,00	211.878.400,00	364.172.000,00	98,50	-71,88
	Jumlah Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	14.461.368.085,00	98,74	7,79

Capaian bagian belanja senilai 98,74 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp11.660.562.659,00 terealisasi senilai Rp11.573.593.825,00 atau 99,25%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp4.006.216.148,00 terealisasi senilai Rp3.896.846.881,00 atau 97,27 %
- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp215.113.357,00 terealisasi senilai Rp211.878.400,00 atau 98,50%

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 7,79%, yaitu Rp14.461.368.085,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp15.682.319.106,00 Pada tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

Ada empat rekening belanja yang realisasinya dibawah 80% diantaranya : belanja pembulatan Gaji PSN realisasinya 79,32% , belanja suku cadang – suku cadang alat bengkel realisasinya 33,65%, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan realisasinya 59,17% dan belanja sewa hotel realisasinya 62,50%.

Adapun penyebab dari rekening belanja yang realisasinya dibawah 80% antara lain disebabkan, diantaranya : Belanja Pembulatan Gaji PNS karena adanya pegawai yang purna tugas ditengah tahun anggaran. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel karena adanya selisih di harga rill dengan harga di SSH terlalu besar, untuk harga suku cadang ini, kami sudah mengajukan SSH baru tapi belum diakomodir oleh Bidang Aset. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan karena adanya penurunan tarif pajak kendaraan tapi di SSH tidak berubah. Belanja Sewa Hotel karena diklat yang sudah dianggarkan offline tapi pelaksanaannya secara online.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran

para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan

adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Aset ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank

setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk

memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp15.682.319.106,00 mencapai 98,74% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp15.881.892.164,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	98,75	14.097.196.085,00
2.	Belanja Modal	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00
Jumlah		15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74	14.461.368.085,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp15.470.440.706,00 atau mencapai 98,75% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp15.666.778.807,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	11.660.562.659,00	11.573.593.825,00	99,25	10.564.214.417,00
2	Belanja Barang Jasa	4.006.216.148,00	3.896.846.881,00	97,27	3.532.981.668,00
J u m l a h		15.666.778.897,00	15.470.440.706,00	98,75	14.097.196.085,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp11.573.593.825,00 atau mencapai 99,25% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp11.660.562.659,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai				
a.	Gaji dan Tunjangan	6.250.619.731,00	6.195.565.104,00	99,28	5.755.858.870,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	433.169.428,00	421.851.040,00	97,39	393.687.198,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.169.428,00	421.851.040,00	97,39	393.687.198,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00	130.230.000,00	100,00	130.230.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.230.000,00	130.230.000,00	100,00	130.230.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	761.370.000,00	752.605.000,00	98,85	675.720.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	761.370.000,00	752.605.000,00	98,85	675.720.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.755.000,00	27.675.000,00	99,71	47.010.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.755.000,00	27.675.000,00	99,71	47.010.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	229.671.400,00	229.136.880,00	99,77	232.613.040,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	229.671.400,00	229.136.880,00	99,77	232.613.040,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.715.874,00	19.736.183,00	95,27	27.650.517,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.715.874,00	19.736.183,00	95,27	27.650.517,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.970,00	64.222,00	79,32	60.675,00
	Belanja Pembulatan PNS	80.970,00	64.222,00	79,32	60.675,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	99,41	4.804.743.547,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	99,41	4.804.743.547,00
	Jumlah	11.660.778.807,00	11.573.593.825,00	99,25	10.564.214.417,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pegawai yang purna tugas di tahun anggaran 2024
2. Adanya pegawai pengangkatan PNS Tahun 2023 yang menjadi pegawai fungsional di tahun 2024

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.896.846.881,00 atau mencapai 97,27% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp4.006.216.148,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	737.762.808,00	716.296.900,00	97,09	552.769.250,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	737.762.808,00	716.296.900,00	97,09	552.769.250,00
	b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa	674.204.340,00	645.874.610,00	95,80	582.163.604,00
	a. Belanja Jasa Kantor	528.080.540,00	505.383.080,00	95,70	489.280.675,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	431.530,00	99,89	324.719,00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.556.800,00	48.000.000,00	98,85	16.800.000,00
	d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	1.250.000,00
	e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta diklat	89.135.000,00	87.060.000,00	97,67	74.508.210,00
3	Belanja Pemeliharaan	59.460.000,00	59.150.000,00	99,48	32.999.545,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	48.500.000,00	100,00	32.999.545,00
	b. Belanja Pemeliharaan	10.960.000,00	10.650.000,00	97,17	0,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.	Gedung dan Bangunan				
	Belanja Perjalanan Dinas	2.534.789.000,0 0	2.475.525.371,0 0	97,66	2.365.049.269, 00
	a. Perjalanan Dinas Biasa	319.329.000,00	288.315.371,00	90,29	147.549.269,00
	b. Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.215.460.000,0 0	2.187.210.000,0 0	98,72	2.217.500.000, 00
Jumlah		4.006.216.148,0 0	3.896.846.881,0 0	97,27	3.532.981.668, 00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut: adanya perbedaan harga di SSH yang lebih besar dibandingkan dengan harga rilnya.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp211.878.400,00 atau mencapai 98,50% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp215.113.357,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00
Jumlah		215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp211.878.400,00 atau mencapai 98,50% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.113.357,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	253.300.000, 00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	253.300.000, 00

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	99,89	68.614.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	99,89	68.614.000,00
	Belanja Modal Mebel	47.093.450,00	47.000.000,00	99,80	68.614.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.522.000,00	45.500.000,00	99,95	0,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	52.702.832,00	51.750.000,00	98,19	5.058.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	5.058.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.446.526,00	22.500.000,00	0,00	5.058.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	506.306,00	500.000,00	98,75	0,00
3	Belanja Modal Komputer	69.795.075,00	67.628.400,00	96,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	47.246.400,00	47.200.000,00	99,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.246.400,00	47.200.000,00	99,90	37.200.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.548.675,00	20.428.400,00	90,60	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.548.675,00	20.428.400,00	90,60	0,00
Jumlah		215.113.357,00	211.878.400,00	98,50	364.172.000,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi TA 2024 Belanja sebesar Rp15.682.319.106,00, sehingga terjadi Surplus/Defisit realisasi APBD sebesar Rp15.682.319.106,00 atau 98,74% dari anggaran sebesar Rp15.881.892.164,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	98,74	14.461.368.085,00
Surplus/ (Defisit)		(15.881.892.164,00)	(15.682.319.106,00)	98,74	(14.461.368.085,00)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Inspektorat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp796.224.055 dan Rp908.710.650 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	454.000,00	737.000,00
2	Aset Tetap	795.770.055,00	907.973.650,00
	Jumlah	796.224.055,00	908.710.650,00

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp454.000,00 dan Rp737.000,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan	454.000,00	737.000,00
	Jumlah	454.000,00	737.000,00

5.3.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp454.000,00 dan Rp737.000,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	454.000,00	737.000,00
	Jumlah	454.000,00	737.000,00

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.795.770.055,00 dan Rp907.973.650,00 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.233.680.769,75	4.021.802.369,75
2	Akumulasi Penyusutan	(3.438.850.714,75)	(3.114.768.719,75)
	Jumlah Bersih	795.770.055,00	907.973.650,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.233.680.769,75 dan Rp4.021.802.369,75. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	4.233.680.769,75	4.021.802.369,75

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 211.878.400 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	4.021.802.369,75
II	Penambahan	
	1 Belanja Modal TA 2024	211.878.400,00
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
	Jumlah Mutasi Kurang	4.233.680.769,75
IV	Saldo Akhir	

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.438.850.714,75 dan Rp3.114.768.720,75.

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp383.355.891,00 dan Rp401.502.637,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	2.009.857,00	20.152.924,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	381.346.034,00	381.349.713,00
	Total	383.355.891,00	401.502.637,00

5.3.2 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 412.868.164,00 dan Rp507.208.013,00. Nilai ekuitas menurun senilai Rp94.339.849,00 atau sebesar 19% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp507.208.013,00.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Inspektorat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Inspektorat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	11.555.447.079,00	10.629.569.192,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.897.129.881,00	3.533.238.068,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	324.081.995,00	359.057.167,44
Jumlah		15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp11.555.447.079,00 dan Rp10.629.569.192,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.177.422.037,00	5.768.188.218,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	4.603.453.299,00	4.244.257.400,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	421.868.704,00	392.880.688,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00	139.230.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	745.260.000,00	684.485.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.675.000,00	47.010.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	229.136.880,00	232.613.040,00
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.736.183,00	27.650.517,00
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	61.971,00	61.573,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.374.413.042,00	4.857.768.974,00
	a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.374.413.042,00	4.857.768.974,00
Jumlah		11.555.447.079,00	14.521.864.427,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya pegawai pengangkatan PNS 2023 menjadi fungsional.
 - b. Adanya purna tugas di tengah tahun anggaran.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 18.146.746,00 (Rp 11.555.447.079,00 - Rp 11.573.593.825,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.573.593.825,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	
Utang Gaji dan Tunjangan	2.009.857,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	381.346.034,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	20.152.924,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	381.349.713,00
Jumlah Penjelasan Selisih	11.555.447.079,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	716.579.900,00	553.025.650,00
1	Beban Barang Pakai Habis	716.579.900,00	553.025.650,00
B	Beban Jasa	645.874.610,00	582.163.604,00
1	Beban Jasa Kantor	505.383.080,00	489.280.675,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	431.530,00	324.719,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	16.800.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	1.250.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta diklat	87.060.000,00	74.508.210,00
6	Beban Pemeliharaan	59.150.000,00	32.999.545,00

7	Beban Perjalanan Dinas	2.475.525.371,00	2.365.049.269,00
Jumlah		3.897.129.881,00	3.533.238.068,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp3.896.846.881,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp3.897.129.881,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya penambahan angka pada beberapa belanja di tahun 2024
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp283.000,00 (Rp 3.897.129.881,00. - Rp 3.896.846.881,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
A	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	737.000,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	454.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp324.081.995,00 dan Rp359.057.167,44. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Inspektorat selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324.081.995,00	359.057.167,44
Jumlah	324.081.995,00	359.057.167,44

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Di tahun 2023 ada mutasi asset anter OPD
 - b. Adanya penambahan pembelian asset dan sudah memasuki umur ekonomis untuk beberapa item aset
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 20XX diungkapkan dalam CaLK.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp15.776.658.955,00 dan Rp14.521.864.427,44 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban-LO	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
	Surplus/(Defisit) Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Beban Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
✓ Beban Operasional	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(15.776.658.955,00)	(14.521.864.427,44)
Jumlah	15.776.658.955,00	14.521.864.427,44

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	507.208.013,00	639.073.674,44

Inspektorat menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2023 pada **Inspektorat** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	15.794.812.701,00	14.521.864.427,44
Surplus/(Defisit) – LO	15.794.812.701,00	14.521.864.427,44

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp15.682.319.106,00 dan Rp14.389.998.766,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Inspektorat Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	412.868.164,00	507.208.013,00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 20XX dan 20XX sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point....*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat berperan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Sumber Daya Inspektorat

Jumlah Sumber Daya yang ada di Inspektorat sebanyak 80 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD. Untuk Nama, Jabatan, NIP dan Golongan ditampilkan dalam lampiran di bawah ini :

JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT DAN STRUKTUR

NO	NAMA	NIP	GO L	JABATAN
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	196812311989031065	IV/c	Inspektur

SEKRETARIAT

2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE,.M.Acc	197104051998032012	IV/b	Sekretaris
3	Muhammad Amrillah, S.STP	199504232017081002	III/b	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
4	Ana Fatmawati, ST,. M.Ak	197908062009012003	III/d	PPUPD Ahli Muda
5	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	198409252010012018	III/d	Perencana Ahli Muda
6	Louch Saufi Gani S	197012242001121002	III/b	Bendahara (Pengeluaran)
7	Muhamad Ghozali Uranganu, SH	197707052010011005	III/b	Pengelola Data
8	Muh. Nanda Pratama, S.STP	199510012018081001	III/b	PPUPD Ahli Pertama
9	Sutikno, SIP	197306282007011010	III/b	Pengelola Kepegawaian
10	Lale Lely Yulita, SIP	198607042010012003	III/b	PPUPD Ahli Pertama
11	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	198804012020121003	III/a	Auditor Ahli Pertama
12	Rina Budiana, SE	199503252020122018	III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
13	Baiq Dita Marisadina Erdiani, S.STP	199805252020082001	III/b	PPUPD Ahli Pertama
14	Yasti Maesarah, SE	199105132022032003	III/a	PPUPD Ahli Pertama
15	Dina Marlina, SE	199304162022032004	III/a	Auditor Ahli

				Pertama
16	Eka Kumari Dewi, S.Akun	199711112022032014	III/a	PPUPD Ahli Pertama
17	Huswatun Hasanah, SE	199510072022032010	III/a	PPUPD Ahli Pertama
18	Ina Sarah Mia, S.M	199803262022032016	III/a	Auditor Ahli Pertama
19	Muhammad Anwar Imaduddin, SE	199401032022031009	III/a	Auditor Ahli Pertama
20	Arif Rahmansyah, S.Ak	199808282022031007	III/a	Auditor Ahli Pertama
21	Marjan	197312312000031037	III/a	Pengelola Data Laporan Hasil Pemeriksaan
22	Muhzan	197412312008011066	III/a	Pengadminis trasi Umum
23	Lalu Muhamad Khadafi	198405242014071003	II/c	Pengelola Kepegawaia n
24	Baiq Noviana Widiastuti	197911242014072005	II/c	Pengelola Pemanfaata n Barang Milik Daerah
25	Mahdan	196612311993031151	II/a	Pengemudi

IRBAN I

26	Maskur, S.Sos	197208291992111001	IV/b	Inspektur Pembantu I
27	Labek, S.Sos	197312311993031033	IV/b	PPUPD Ahli Madya
28	Sulityowati, SIP	197501102009012004	IV/a	Auditor Ahli Madya
29	Widawan, SIP	197602281999031007	IV/a	PPUPD Ahli Madya
30	Lale Rostika Zahara, S.Sos	197610062000032002	IV/a	PPUPD Ahli Madya
31	Hj. Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut,. M.Ak	198209232008032001	III/d	Auditor Ahli Muda
32	Lale Budia Zoriani, SE	198607162011012015	III/d	Auditor Ahli Muda

33	Salman, S.AP	196812311993031102	III/d	Auditor Penyelia
34	Muhamad Rifai, S.Adm	197412221997031004	III/d	Auditor Ahli Muda
35	Ria Dwi Purwanty, SH	198606172011012010	III/c	Auditor Ahli Muda
36	Arifin, SE	197903302014071003	III/b	Auditor Ahli Pertama

IRBAN II

37	Lalu Yusuf Anshary, ST., M.Sc	197811242003121002	IV/b	Inspektur Pembantu II
38	Muhamad Aminudin, SP	197210301998031009	IV/b	PPUPD Ahli Madya
39	Prayudia Wardani, SE	197710152006042009	IV/b	PPUPD Ahli Madya
40	Muh. Iswandi, SE	198205172006041010	IV/b	Auditor Ahli Madya
41	Yuliana Maria, SE	198403142009012003	IV/a	Auditor Ahli Madya
42	Subardan, S.Sos	196812311988031093	IV/a	Auditor Ahli Muda
43	Lalu Abdul Wasit, S.IP	197603292001121005	III/d	Auditor Ahli Muda
44	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	198004172010012008	III/d	Auditor Ahli Muda
45	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	198502202011011011	III/d	PPUPD Ahli Muda
46	Samsu Haidi, S.T	198412312015031003	III/c	Auditor Ahli Muda
47	Sri Junih, S.IP	197006122006042003	III/a	PPUPD Ahli Pertama

IRBAN III

48	Dafina Fatana, SE, M.Acc	197211241999022001	IV/b	Inspektur Pembantu III
49	Mohamad Amrullah, SE, M.Ak	196808011990031009	IV/c	PPUPD Ahli Madya
50	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	196507251987012002	IV/b	PPUPD Ahli Madya
51	Erma Wahyuni, SKM	197510022000122004	IV/b	Auditor Ahli Madya
52	I Nyoman Budiarta, BA	196412311987031283	IV/a	PPUPD Ahli Madya

53	Liya Maryatni, S. Far	198210202010012020	IV/a	Auditor Ahli Madya
54	Baiq Novi Fatma Nurbuatin, SE	198511112005012001	III/d	Auditor Ahli Muda
55	Baiq Vera Febriana Angri, S.Farm	198702042011012019	III/d	Auditor Ahli Muda
56	Fathul Jawadi, M.Ak	197702162008031001	III/d	Auditor Ahli Muda
57	Moh. Tajudin, ST	197912312005011025	III/b	Auditor Ahli Pertama
58	Sahruman Anwar, S.IP	197201022006041009	III/b	Auditor Ahli Pertama
59	Baiq Nunik Hartati, A.Md	198011182014072002	III/a	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan

IRBAN IV

60	Dra. Suhada	196707081994032009	IV/b	Inspektur Pembantu IV
61	Hj. Anita Indriani, SH	196812091993032010	IV/b	PPUPD Ahli Madya
62	Sahabudin, SH	196512311992031194	IV/b	PPUPD Ahli Madya
63	Iwan Yulianto, SE	197107231997031009	IV/b	Auditor Ahli Madya
64	Zainul Wardi, S.Sos	197005071992031012	IV/a	Auditor Ahli Madya
65	Budi laksono, SE	197802282010011010	IV/a	Auditor Ahli Madya
66	Aluh Usbaniati, ST	197810142011012008	III/d	Auditor Ahli Muda
67	Roni Hamdani, S.Hut	197903242011011005	III/d	Auditor Ahli Muda
68	Dwi Hardiyanto, S.Kom	197803252009011005	III/d	Auditor Ahli Muda
69	Agustina lindawati, SE	197608202006042005	III/b	Auditor Ahli Pertama
70	Bayu Prayitno, SIP	197312062009011001	III/a	PPUPD Ahli Pertama

IRBAN KHUSUS

71	Sapto Sayogo, SH	196802221992031015	IV/b	Auditor Ahli Madya
----	------------------	--------------------	------	--------------------

72	Naily Indriaty, SE.,M.Si	197608132000032003	IV/b	Auditor Ahli Madya
73	Bambang, S.Sos	197702122003121009	IV/a	Auditor Ahli Madya
74	I Ktut Budiarta, ST	197611122010011003	IV/a	Auditor Ahli Madya
75	Devy Ervina Indriastuti, SE	197502252006042008	III/d	Auditor Ahli Muda
76	Lalu Agus Marwijaya, SH	197105312008011006	III/d	PPUPD Ahli Muda
77	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	197409112006041006	III/d	Auditor Ahli Muda
78	Hadi Dwi Purnomo, SE	198305292011011006	III/d	Auditor Ahli Muda
79	Taupikurrahman Ishadi, SE	198211012009011004	III/d	Auditor Ahli Muda
80	Siti Badriyah, A. Md	198501082009012003	III/d	Auditor Penyelia

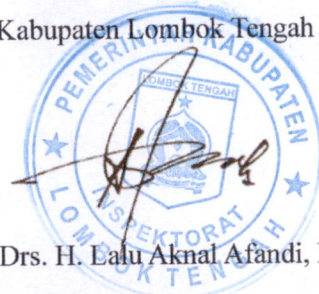
BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 17 Januari 2025

Inspektur Inspektorat

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM

NIP. 196812311989031065



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT
LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat Tulis kantor	737.000,00	
	1.1.12.01.03.0001	Persediaan Bahan Pakai Habis		737.000,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas nilai persediaan awal</i>		
2	1.1.12.01.03.0001	Persediaan Bahan Pakai Habis	454.000,00	
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat Tulis kantor		454.000,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas nilai persediaan akhir tahun 2024</i>		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	381.349.713,00	
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		381.349.713,00
		Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang belanja TPP awal tahun 2024</i>		
4	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	381.346.034,00	
	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		381.346.034,00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun</i>		
5	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	520.900	
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	68.610	
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.420.000	
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	347	
	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		520.900
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		68.610
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		1.420.000
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS		347
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya</i>		
6	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok		11.334.380
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga		50.946
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional		8.765.000
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan		2.598
	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	11.334.380	
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	50.946	

	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	50.946	
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN - Tunjangan Fungsional PNS	8.765.000	
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PNS	2.598	
		<i>Jurnal Penyesuaian atas nilai utang belanja pegawai awal tahun 2024</i>		
7		Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin	324.081.995	
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin		324.081.995
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pengakuan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin</i>		
JUMLAH			1.110.131.523,00	1.110.131.523,00

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Januari tahun **dua ribu dua empat** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
6. Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

**a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan**



**Widya Astuti, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006**

**Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah**

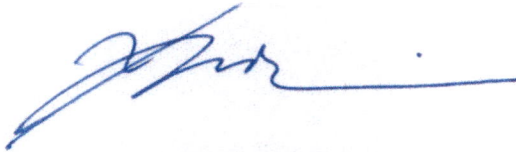


**Dr. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP: 196812311989031065**

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Uru t	Uraian / Rincian Pos Pos LPE	LPE Menurut		Selisi h	Koreksi Selisih + / (-)		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPK D	SKP D	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 4 + 7
	EKUITAS AWAL	507.208.013,00	507.208.013,00				507.208.013,00
	SURPLUS/(DEFISIT) -LO)	(15.776.658.955,00)	(15.776.658.955,00)				(15.776.658.955,00)
	RK PPKD	15.682.319.106,00	15.682.319.106,00				15.682.319.106,00
	EKUITAS AKHIR	412.868.164,00	412.868.164,00				412.868.164,00
	Jumlah						

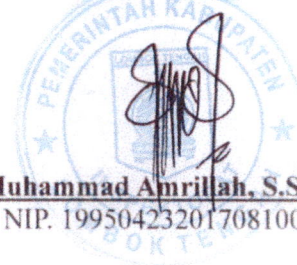
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Widya Astuti, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

Praya, 17 Januari 2024

a.n Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah
PPK – SKPD



Muhammad Amrillah, S.STP.
NIP. 199504232017081002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
8	BEBAN	15.776.658.955,00	15.776.658.955,00	-	-	-	15.776.658.955,00
8.1	BEBAN OPERASI	15.776.658.955,00	15.776.658.955,00	-	-	-	15.776.658.955,00
8.1.0	Beban Pegawai	11.555.447.079,00	11.555.447.079,00	-	-	-	11.555.447.079,00
8.1.0	Beban Barang dan Jasa	3.897.129.881,00	3.897.129.881,00	-	-	-	3.897.129.881,00
8.1.0	Beban Penyusutan dan Amortisasi	324.081.995,00	324.081.995,00	-	-	-	324.081.995,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.776.658.955,00)	(15.776.658.955,00)	-	-	-	(15.776.658.955,00)
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO			-	-	-	
7.4.0	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			-	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT -LO	(15.776.658.955,00)	(15.776.658.955,00)	-	-	-	(15.776.658.955,00)
	Jumlah						

Praya, 17 Januari 2024

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Widya Astuti, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

a.n Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah
PPK – SKPD

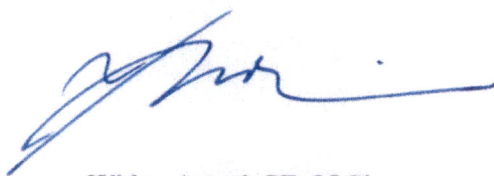


Muhammad Amriyah, S.STP.
NIP. 199504232017081002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	ASET	796.224.055,00	796.224.055,00	-			796.224.055,00
1.1	ASET LANCAR	454.000,00	454.000,00				454.000,00
1.1.12	Persediaan	454.000,00	454.000,00				454.000,00
1.3	ASET TETAP	795.770.055,00	795.770.055,00	-			795.770.055,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.233.680.769,75	4.233.680.769,75				4.233.680.769,75
1.3.07.01	Akm peny peralatan dan mesin	(3.438.850.714,75)	(3.438.850.714,75)				(3.438.850.714,75)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	940.000,00	940.000,00				940.000,00
2	KEWAJIBAN	383.355.891,00	383.355.891,00	-			383.355.891,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	383.355.891,00	383.355.891,00				383.355.891,00
2.1.06	Utang Belanja Pegawai	383.355.891,00	383.355.891,00				383.355.891,00
	TOTAL EKUITAS	412.868.164,00	412.868.164,00	-			412.868.164,00
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	796.224.055,00	796.224.055,00	-			796.224.055,00

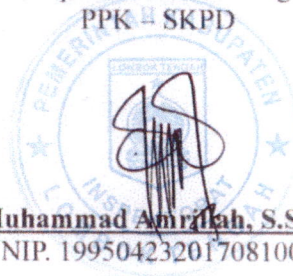
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Widya Astuti, SE, M.Si
 NIP. 197503022000032006

Praya, 17 Januari 2024

a.n Inspektur Inspektorat
 Kabupaten Lombok Tengah
 PPK - SKPD



Muhammad Amrillah, S.STP.
 NIP. 199504232017081002

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Sel isih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SK PK D	SK PD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5	BELANJA DAERAH	15.682.319.106	15.682.319.106	-	-	-	15.682.319.106
5.1	BELANJA OPERASI	15.470.440.706	15.470.440.706	-	-	-	15.470.440.706
5.1.01	Belanja Pegawai	11.573.593.825	11.573.593.825	-	-	-	11.573.593.825
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.896.846.881	3.896.846.881	-	-	-	3.896.846.881
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.470.440.706	15.470.440.706	-	-	-	15.470.440.706
5.2	BELANJA MODAL	211.878.400	211.878.400	-	-	-	211.878.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.878.400	211.878.400	-	-	-	211.878.400
	JUMLAH BELANJA	15.682.319.106	15.682.319.106	-	-	-	15.682.319.106
	SURPLUS/DEFISIT	(15.682.319.106)	(15.682.319.106)				(15.682.319.106)

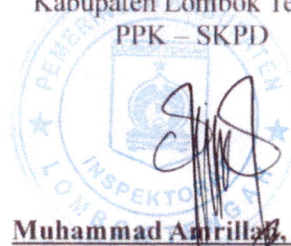
a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Widya Astuti, SE, M.Si
NIP. 197503022000032006

Praya, 17 Januari 2024

a.n Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah
PPK – SKPD



Muhammad Anrilah, S.STP.
NIP. 199504232017081002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/28/TT/INS/2024 dengan perhitungan kas sebagai berikut :

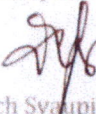
Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 2 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp15.718.616.848,00	
Pengeluaran periode sama	<u>Rp15.718.616.848,00-</u>	
Saldo buku		Rp0,00
Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :		
Uang tunai di brankas	Rp0,00	
Uang kertas <i>(jika ada harus dirincikan)</i>	Rp0,00	
Uang logam <i>(jika ada harus dirincikan)</i>	Rp0,00	
Uang di rekening	Rp0,00	
Jumlah kas		<u>Rp0,00-</u>
Selisih kas		Rp0,00

Penjelasan atas selisih kas : -

Catatan : Saldo kas telah disetorkan tanggal 31 Desember 2024 dan telah divalidasi namun belum terbaca SIPD sehingga tetap muncul angkanya dalam LPJ Fungsional Desember 2024.


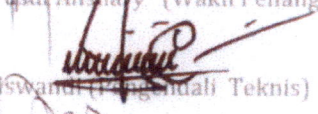
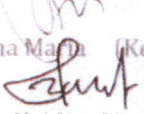
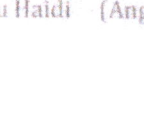
Menyetujui
Bendahara Pengeluaran pada
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah


(Louch Syampi Gani, S)
NIP.197012242001121002

Mengetahui
Inspektur
Kabupaten Lombok Tengah


(Drs. H. Lalo Akmal Afandi, MM)
NIP. 196812311989031065

Tim Pemeriksa:

-  1. Lalu Yusuf Anshary (Wakil Penanggung jawab)
-  2. Muh. Iswandi (Pengendali Teknis)
-  3. Yuliana Mardiana (Ketua Tim)
-  4. Samsu Haidi (Anggota)



KC Praya (003)

Jl. Gajah Mada No 127 Praya Lombok Tengah

NO. REKENING : 003 21.00.231004-
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 003351194915000
PERIODE : 01/01/2024 s.d 31/12/2024

NAMA : BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT
ALAMAT : JLN RADEN PUGUH BLOK C PUYUNG JONGGAT

REKENING KORAN

Hal 1 dari 231

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Jumlah Mutasi	D/K	Saldo	D/K	UserId	Spv	Cab Lok
SALDO AWAL							0.00	D			
1	09-01-2024	t163300005	296	1/LS/6.01.0.00.0.00.01.0 000/M/1/2024 INSPEKTORAT	373,244,600.00	K	373,244,600.00	K	t1633	sy886	003
2	09-01-2024	t172300042	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)-GAJI-LALE LELY YULITA	295,755,304.00	D	77,489,296.00	K	t1723	sy886	003
3	10-01-2024	t158400003	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) AN LALE LELY YULITA	77,489,296.00	D	0.00	D	t1584	n8190	003
4	15-01-2024	t163300007	296	2/UP/6.01.0.00.0.00.01.0 000/M/1/2024 INSPEKTORAT	328,000,000.00	K	328,000,000.00	K	t1633	sy886	003
	16-01-2024	t172300049	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)-UP-LALE LELY YULITA	30,000,000.00	D	298,000,000.00	K	t1723	sy886	003
6	16-01-2024	t163300026	296	4/LS/6.01.0.00.0.00.01.0 000/M/1/2024 INSPEKTORAT	337,424,592.00	K	635,424,592.00	K	t1633	sy886	003
7	16-01-2024	t163300027	296	3/LS/6.01.0.00.0.00.01.0 000/M/1/2024 INSPEKTORAT	19,040,600.00	K	654,465,192.00	K	t1633	s0785	003
8	16-01-2024	t172300074	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)-TPP-LALE LELY YULITA	262,110,284.00	D	392,354,908.00	K	t1723	sy886	003
9	17-01-2024	t185300018	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) AN LALE LELY YULITA - SISA TPP & KEKURANGAN GAJI	94,354,908.00	D	298,000,000.00	K	t1853	n8190	003
10	18-01-2024	t172300044	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)-UP-LOUCH SYAUFU GANI	30,000,000.00	D	268,000,000.00	K	t1723	n8190	003
11	18-01-2024	8880536134	199	TRF(INT) 0032202258222 Pemb. OP Audit Ketaatan Pengelolaan Dana BOS TA. 23 pd SMPN 1 Pratim, SDN Bebile Kec Pratim, SDN Tana	2,100,000.00	D	265,900,000.00	K	IBCRP		003
12	18-01-2024	8880536135	199	TRF(INT) 0032201116220 Pemb OP Audit terhadap 13 Item Pekerjaan di Danau	2,380,000.00	D	263,520,000.00	K	IBCRP		003

NO. REKENING : 003 21.00.231004- NAMA : BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 NPWP : 003351194915000
 PERIODE : 01/01/2024 s.d 31/12/2024 ALAMAT : JLN RADEN PUGUH BLOK C PUYUNG JONGGAT

REKENING KORAN

Hal 230 dari 231

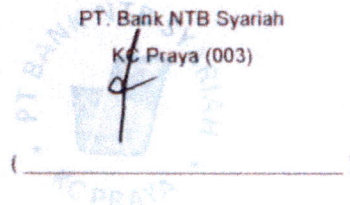

No.	Tgl. Transaksi	No. Arslp	Kode TX	Keterangan	Jumlah Mutasi	D/K	Saldo	D/K	UserId	Spv	Cab Lok
162324-12-2024		8880687100	199	Honorarium Tim Pelaksana TRF_INT_CMS_0032100 231004_0030210189272 _BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT_FAJAR SAID SH LLM_Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegi	665,000.00	D	24,683,369.00	K	IBCRP		003
162424-12-2024		8880687101	199	TRF_INT_CMS_0032100 231004_0030210715273 _BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT_SAMSU L HAKIM_Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	498,750.00	D	24,184,619.00	K	IBCRP		003
162524-12-2024		8880687102	199	TRF_INT_CMS_0032100 231004_0032200271221 _BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT_DAFINA FATANA SE M ACC_Pembayaran Honorarium Tim Pelaksan	446,250.00	D	23,738,369.00	K	IBCRP		003
162624-12-2024		8880687103	199	TRF_INT_CMS_0032100 231004_0032208931022 _BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT_LALU PATHUL BAHRI, SIP_Pembayaran Honorarium Tim	1,275,000.00	D	22,463,369.00	K	IBCRP		003
162724-12-2024		8880687104	199	Asistensi TRF_INT_CMS_0032100 231004_0030200000280 _BENDH PENGELUARAN INSPEKTORAT_H M NURSI AH SSOS_Pembayaran Honorarium Tim	1,275,000.00	D	21,188,369.00	K	IBCRP		003
2827-12-2024		1186800015	102	Asistensi Perce PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) an lala lely yulita	21,188,369.00	D	0.00	D	11868	n8190	003

SALDO AWAL		0.00
MUTASI DB	13,936,678,592.00	
MUTASI KR	13,936,678,592.00	
SALDO AKHIR		0.00
SALDO BLOKIR		0.00

PRAYA, 07 Januari 2025

PT. Bank NTB Syariah

KC Praya (003)



Printed By : t1725, 07/01/25 09:44



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Lalu Yusuf Anshary	Wakil Penanggung Jawab
2	Muh. Iswandi	Pengendali Teknis
3	Yuliana Maria	Ketua Tim
4	Samsu Haidi	Anggota

Sesuai dengan surat perintah tugas nomor 700/28/TT/INS/2024 Tanggal 27 Desember 2024, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2024 kepada :

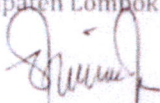
Nama Lengkap : Baiq Noviana Widiastuti

Jabatan : Bendahara Barang pada Inspektorat

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
1.	Tinta Printer Warna Merah	1	buah
2.	Kertas HVS F4, Putih, 70 gram	4	rim
3.	Map biasa (stop map), bahan kertas ukuran F4	1	pack

Menyetujui
Bendahara Barang
pada Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah

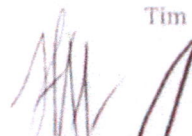


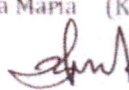

Baiq Noviana Widiastuti
NIP.197911242014072005

Mengetahui
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP.196812311989031065

Tim Pemeriksa:

-  1. Lalu Yusuf Anshary (Wakil Penanggung Jawab)
-  2. Muh. Iswandi (Pengendali Teknis)
-  3. Yuliana Maria (Ketua Tim)
-  4. Samsu Haidi (Anggota)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN STOCK OPNAME ATAS PERSEDIAAN HABIS PAKAI
PER 31 Desember 2024

ORGANISASI : INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH
KODE ORGANISASI : 12.15.02.14

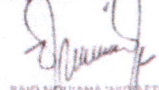
No	Nama Barang	Volume Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi			Sisa
						B	RR	RB	
1	Tinta Printer Warna Biru : Epson 664 isi 70ml		kotak/pack	129,500	0	B	RR	RB	0
2	Tinta Printer Warna Hitam : Epson 664 isi 70ml		kotak/pack	129,500	0	B			0
3	Tinta Printer Warna Kuning : Epson 664 isi 70ml		box	129,500	0				0
4	Tinta Printer Warna Merah/Magenta : Epson 664 isi 70ml		box	129,500	0	B			0
5	tinta printer warna biru : Epson		buah	142,500	0	B			0
6	tinta printer warna hitam : Epson		kotak	142,500	0				0
7	tinta printer warna kuning : Epson		kotak	142,500	0	B			0
8	tinta printer warna merah/magenta : Epson	1	buah	142,500	142,500	B			1
9	Tinta Printer Warna biru : Epson 70ml		lusin	110,000	0				0
10	Tinta Printer Warna kuning : Epson 70ml		buah	110,000	0				0
11	Tinta Printer Warna merah : Epson isi 70ml		buah	110,000	0	B			0
12	Kertas HVS A4, 70 gram		rim	55,000	0	B			0
13	Kertas HVS F4, putih 70 gram	4	rim	65,000	260,000	B			4
14	Kertas HVS A4, 70 gram		rim	57,500	0				0
15	Kertas HVS F4, putih 70 gram		rim	57,500	0				0
16	Kertas Hvs : F4 Warna 70 gram		rim	70,000	0				0
17	Map biasa(stop Map), bahan kertas ukuran F4 216x330mm	1	pack	51,500	51,500				1
18	Balpoint Merk : Faster		kotak	46,500	0				0
19	Map ordener bahan PVC, ukuran F4 216x330mm, tebal 7cm		Pack	38,275	0				0
20	Binder clip no 155, 11/4in=32mm isi 12 biji		kotak	25,500	0				0
21	Binder clip n0 260, 2 in=51mm, isi 12 biji		Kotak	38,500	0				0
22	Kertas Kartoon foil merk buffalow, warna warni		lembar	6,400	0				0
23	Tinta Stempel, tinta stempel ungu isi 50c		botol	22,000	0				0
24	Balpoint, snowman V3 isi 12 biji		kotak	45,000	0				0
25	Amplop ber Kop sedang		pack	35,000	0				0
26	Amplop besar dengan kopukuran folio untuk kirim LHP		pack	58,000	0				0
27	Box File Plastik Halus		Pcs	25,500	0				0
28	Isi Pisau Cutter, Uk, Besar, isi, 5 Pcs		kotak	9,700	0				0
29	Lem Diukol isi 200gr		botol	12,500	0				0
30	Map Biasa (Stop Map)		pack	54,100	0				0
31	Map Ordener Plastik Ukuran Besar		pack	25,500	0				0
32	Binder Klip (Penjepit Kertas), No, 111		pack	9,500	0				0
33	Amplop, Polos, 104 (putih) 100 lbr		Kotak	45,000	0				0
34	Amplop Kecil dengan Kop, ukuran 1/4 folio untuk kirim surat		kotak	55,000	0				0
35	Klip Merk seagull		kotak	6,400	0				0
Jumlah Opname Bulan Ini					454,000				6

Mengetahui,
INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Des. N. LALU AKNAL AFANDI, MM
NIP. 196812311989031065

Praya, 31 Desember 2024
Pengelola Perencanaan BMO.



BAIQ NOVIANA WIGASTUTI
NIP. 19791124201407 2 005

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : *0001/464/INSPEKTORAT*

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
NIP : 19681231 198903 1 065
Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng.
NIP : 19730510 199902 1 001
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah untuk Triwulan IV (Januari s/d Desember) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah dengan cara membandingkan data Pengadaan dan data Penghapusan Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh Pengguna barang dengan Laporan Rekapitulasi Data Pengadaan dan data Penghapusan Barang Daerah yang disusun oleh Bidang Aset Daerah dengan hasil sesuai data yang disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah



TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng.
NIP. 19730510 199902 1 001

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
NIP. 19681231 198903 1 065

T PENGUNA BARANG
 UPATEN/KOTA
 DIVINSI
 DE LOKASI

: INSPEKTORAT
 : LOMBOK TENGAH
 : NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PENGADAAN BARANG
 DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2D/Kwitansi		BAST		Banyaknya Barang	Jumlah		Dipergunakan pada unit	Ket
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Notebook Asus Vivobook	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	TBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/INSP/2024	6	7.200.000,00	43.200.000,00	Sekretariat	
Printer Epson L6270	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	TBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/INSP/2024	2	5.189.200,00	10.378.400,00	Adum & Keuangan	
Scanner ADF Merk Brother Ads 3300W	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	TBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/INSP/2024	1	7.800.000,00	7.800.000,00	Evalap	
Mesin Foto Copy Canon IR 2425 DADF	20 Mei 2024	027/176/INSP/2024	06 Juni 2024	TBP/LS/INSP/2024	06 Juni 2024	800/179/BAST/INSP/2024	1	45.500.000,00	45.500.000,00	Evalap	
Peralatan Studio Audio/Mic Wireless (Jepi)			17 Juli 2024	0282/TBP-GU/INS/2024	17 Juli 2024	0282/BAPB/INS/2024	1	3.600.000,00	3.600.000,00	Adum & Keuangan	
Peralatan Studio Audio (Stand Mic)	21 Okt 2024						1	900.000,00	900.000,00	Sekretariat	
Peralatan Mebel (Lemari Arisp)	23 sep 2024	027/342/Insp/2024	30 Okt 2024	52.02/04.0/000044/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PP R/1/10/2024	18 Okt 2024	800/349/Insp/2024	1	8.420.000,00	8.420.000,00	R Inspektur	
							6	6.430.900,00	38.580.000,00	R Irban Dan R Sekertans	
Peralatan Studio Audio/Speaker Aktif dan Kamera)	15 Okt 2024	027/359/Insp/2024	30 Okt 2024	52.02/04.0/000045/LS/6.01.000.0.00.01.0000/PP R/1/10/2024	24 Okt 2024	800/360/Insp/2024	1	18.900.000,00	18.900.000,00	Auia Rapat Utama	
Belanja Baterai Laptop			03 Des 2024	0558/TBP-GU/INS/2024		0558/BAST/INSP/2024	1	28.750.000,00	28.750.000,00	Sekretariat	
Belanja Charger Laptop			03 Des 2024	0559/TBP-GU/INS/2024		0559/BAST/INSP/2024	4	1.000.000,00	4.000.000,00	R Irban Dan R Sekertans	
							1	2.250.000,00	2.250.000,00	R Irban Dan R Sekertariat	
Total Pengadaan Belanja Modal											
									211.878.400,00		

Praya, 31 Desember 2024
 Pengurus Barang

Mengetahui,
 Inspektur Inspektorat
 Kabupaten Lombok Tengah,

[Signature]
 Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
 NIP. 19681231 198903 1 065

[Signature]
 BAIQ NOYIANA WIDIASTUTI
 NIP. 19791124 201407 2 005

REKAPITULASI DAN CATATAN ATAS REKONSILIASI NILAI ASET JANUARI/0 DESEMBER 2024
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NAMA OPD : Inspektorat
KODE LOKASI : 12.15.02.14.01.01.01

No	AKUN NERACA	NERACA AWAL 2023	NERACA SESUAI 106	LRA TW IV	PENAMBAHAN			PENGURANGAN				NILAI AKHIR NERACA TW IV TAHUN 2024	KET	
					REKLAS	HIBAH	MUTASI	REKLAS	HIBAH	MUTASI	EKSTRA			PENGHAPUSAN
A	ASET LANCAR													
1	Persediaan													
A	ASET TETAP	4.022.742.389,78	4.022.742.389,78	211.878.400,00										4.234.620.789,78
1	KIB A (Tanah)	0,00	0,00	0,00										0,00
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	4.021.862.369,72	4.021.862.369,72	211.678.400,00										4.233.680.769,72
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	0,00	0,00	0,00										0,00
4	KIB D (Jalan, jembatan, dan Jembatan)	0,00	0,00	0,00										0,00
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	940.000,00	940.000,00	0,00										940.000,00
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0,00	0,00	0,00										0,00
B	ASET LAINNYA	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00										103.000.000,00
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00										0,00
2	Aset Lain-lain	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00										103.000.000,00
C	TOTAL (A+B)	4.125.742.389,78	4.125.742.389,78	211.878.400,00	0,00			0,00						4.337.620.789,78

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



GAJUNG JURNALMAN RDA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng.
NIP. 19730419 199902 1 001

INSPEKTUR, INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
NIP. 19681231 198303 1 065

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 8001/463/INSPEKTORAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MUHAMMAD AMRILLAH, S. STP
NIP : 199504232017081002
Jabatan : Kasubag Adm. Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kasubag Admininstrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : BAIQ NOVIANA WIDIASTUTI.
NIP : 197911242014072005
Jabatan : Pengelola dan pemanfaatan Barang
dalam hal ini bertindak selaku Pengelola dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah untuk Triwulan IV (Januari s/d Desember) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah dengan cara membandingkan data Pengadaan dan data Penghapusan Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh Pengguna barang dengan Laporan Rekapitulasi Data Pengadaan dan data Penghapusan Barang Daerah yang disusun oleh Bidang Aset Daerah dengan hasil sesuai data yang disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

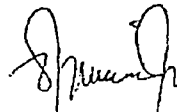
Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Inspektorat Kab. Lombok Tengah
Kasubag Adm. Umum dan
Keuangan



MUHAMMAD AMRILLAH, S. STP
NIP.199504232017081002

Pengelola dan pemanfaatan BMD



BAIQ NOVIANA WIDIASTUTI
NIP. 197911242014072005

UNIT PENGGUNA BARANG
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
KODE LOKASI

: INSPEKTORAT
: LOMBOK TENGAH
: NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PENGADAAN BARANG
DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

No.	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SP2DKwilansi		BAST		Jumlah		Dipergunakan p unit	
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Notebook AsusVivobook	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	ITBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/ INSP/2024	6	7.200.000,00	43.200.000,00	Sekretariat
2	Printer Epson L6270	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	ITBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/ INSP/2024	2	5.189.200,00	10.378.400,00	Adm & Keuan
3	Scanner ADF Merk Brother Ad3 3300W	21 Mar 2024	027/115/Insp/2024	16 April 2024	ITBP/LS/INSP/2024	16 Apr 2024	800/118/BAST/ INSP/2024	1	7.800.000,00	7.800.000,00	Evaluasi
4	Mesin Foto Copy Canon IR 2425 DADF	20 Mei 2024	027/116/INSP/2024	05 Juni 2024	ITBP/LS/INSP/2024	05 Juni 2024	800/179/BAST/ INSP/2024	1	45.500.000,00	45.500.000,00	Evaluasi
5	Peralatan Studio Audio(Mic Wireless Jepit)			17 Juli 2024	0282/TOP/GU/INS/2024	17 Juli 2024	0282/BAPB/IN S/2024	1	500.000,00	500.000,00	Sekretariat
6	Peralatan Studio Audio / Stand Mic	21 Okt 2024		30 Okt 2024	52 02/04 0/000044/LS/5 01 0 00 0 00 01 0000/PP R/1/10/2024	18 Okt 2024	800/349/ Insp/2024	1	8.420.000,00	8.420.000,00	R. Inspektur
7	Peralatan Mebel (Lemari Arsip)	23 sep 2024	027/342/Insp/2024					6	6.430.000,00	38.580.000,00	R. Irwan Dan Sekretaris
8	Peralatan Studio Audio(Speaker Aktif dan Kamera)	15 Okt 2024	027/359/Insp/2024	30 Okt 2024	52 02/04 0/000045/LS/6 01 0 00 0 00 01 0000/PP R/1/10/2024	24 Okt 2024	800/360/Insp/2 024	1	18.900.000,00	18.900.000,00	Aula Rapat Uda
9	Belanja Baterai Laptop			03 Des 2024	0558/1BP-GU/INS/2024		0558/BAST/IN SP/2024	4	1.000.000,00	4.000.000,00	Sekretariat
9	Belanja Charger Laptop			03 Des 2024	0559/1BP-GU/INS/2024		0559/BAST/IN SP/2024	1	2.250.000,00	2.250.000,00	
Total Pengadaan Delanja Modal										211.878.400,00	

Praya 31 Desember 2024
Pengurus Barang



BAIG NOVIANA WIDIASUTI
NIP.19791124 201407 2 005

Mangestahui
Inspektoral Kab. Lombok Tengah
Kesubag Adm Urutan Dan Keuangan

MUHAMMAD AMRILAH, S. STP
NIP. 19550423017081902

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK INSPEKTORAT JANUARI S/D DESEMBER 2024

SKPD : Inspektorat
 KODE LOKASI : 12.15.02.14.01.01.01

No	Akun Neraca	Nilai Pengadaan Januari S/D Desember 2024						MET
		SKPD	BIDANG ASET DAERAH	SELISIH	KOREKSI		NILAI REKON	
					SKPD	BIDANG ASET DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASET TETAP	211,878,400.00	211,878,400.00	-			211,878,400.00	
1	Kis A (Tanah)	0.00	0.00	-			0.00	
2	Kis B (Peralatan dan Mesin)	211,878,400.00	211,878,400.00	-			211,878,400.00	
3	Kis C (Gedung dan Bangunan)	0.00	0.00	-			0.00	
4	Kis D (Jalan, Rigasi, dan Lintasan)	0.00	0.00	-			0.00	
5	Kis E (Aset Tetap Lainnya)	0.00	0.00	-			0.00	
6	Kis F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0.00	0.00	-			0.00	
B	ASET LAINNYA	0.00	0.00	-			0.00	
1	Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	-			0.00	
2	Aset lain-lain	0.00	0.00	-			0.00	
C	EKSTRA KOMPATABEL	0.00	0.00	-			0.00	
1	Ekstra Kompatabel Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	-			0.00	
2	Ekstra Kompatabel Gedung Bangunan	0.00	0.00	-			0.00	
D	ASET TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	0.00	0.00	-			0.00	
1	Aset Tetap Lainnya Tidak Memenuhi Aset tetap	0.00	0.00	-			0.00	
	JUMLAH (A+B+C)	211,878,400.00	211,878,400.00				211,878,400.00	

Inspektorat Kab. Lombok Tengah
 Kasubag Adm Umum dan Keuangan

MUHAMMAD AMRILAH, S. STP
 NIP. 199504232017081002

Pengelola dan Pemanfaatn BMD

BAIQ NOVIANA WIDIASTUTI
 NIP. 197911242014072005


REKONSILIASI DATA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

SKPD
KODE LOKASI

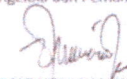
No	Akun Neraca	Nilai Penghapusan Januari S/D Desember 2024						KET
		PENGHAPUSAN		SELISIH	KOREKSI		TOTAL PENGHAPUSAN	
		SKPD	BIDANG ASET DAERAH		SKPD	BIDANG ASET DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASET TETAP							
1	KIB A (Tanah)							
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)							
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)							
4	KIB D (Jalan, rigasi, dan Jaringan)							
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)							
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)							
	JUMLAH							
B	ASET LAINNYA							
1	Aset Tidak Berwujud							
2	Aset Lain-lain							
3	Aset Rusak Berat							

NIHIL

Inspektorat Kab. Lombok Tengah
Kasubag Adm Umum dan Keuangan


MUHAMMAD AMRIYAH, S. STP
NIP. 199504232017081002

Pengelola dan Pemanfaatan BMD


BAIQ NOVIANA WIDIASTUTI
NIP 197911247014072005

REKAPITULASI DAN CATATAN ATAS REKONSILIASI NILAI ASET JANUARI/D DESEMBER 2024
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NAMA OPD : Inspektorat
KODE LOKASI : 12.15.02.14.01.01.01

No	AKUN NERACA	NERACA AWAL 2023	NERACA SESUAI 108	LRA TW IV	PENAMBAHAN			PENGURANGAN				NILAI AKHIR NERACA TW IV TAHUN 2024	
					REKLAS	HIBAH	MUTASI	REKLAS	HIBAH	MUTASI	EKSTRA		PENGHAPUSAN
A	ASET LANCAR												
1	Persediaan			211.878.400,00									4.234.620.758
A	ASET TETAP	4.022.742.369,75	4.022.742.369,75										4.233.680.758
1	KIB A (Tanah)	0,00	0,00										0
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	4.021.802.369,75	4.021.802.369,75	211.878.400,00									0
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	0,00	0,00										0
4	KIB D (Jalan, jembatan, dan Jaringan)	0,00	0,00										0
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	940.000,00	940.000,00	0,00									940.000
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0,00	0,00	0,00									0
B	ASET LAINNYA	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00									103.000.000
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00									0
2	Aset Lain-lain	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00									103.000.000
C	TOTAL (A+B)	4.125.742.369,75	4.125.742.369,75	211.878.400,00	0,00			0,00					4.337.620.758

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TWNGAH
Kasubag Adm, Umum dan Keuangan

MUHAMMAD AMRILLAH, S. STP
NIP. 199504232017081002

Pengelola dan Pemanfaatan BMD

BAIQ NOVIANA WIDHASTUTI
NIP. 197911242018072005



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN
Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Pengawasan
Unit Organisasi : Inspektorat
Sub Unit Organisasi : Inspektorat
U P B : Inspektorat

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU 31-Dec-2024
				Semester I	Semester II		
	1. Aset Tetap	4,234,620,769.75	3,114,768,719.75	164,562,779.00	159,519,216.00	3,438,850,714.75	795,770,055.00
2	PERALATAN MESIN	4,233,680,769.75	3,114,768,719.75	164,562,779.00	159,519,216.00	3,438,850,714.75	794,830,055.00
5	ASET TETAP LAINNYA	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
	JUMLAH	4,234,620,769.75	3,114,768,719.75	164,562,779.00	159,519,216.00	3,438,850,714.75	795,770,055.00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2024

Bidang : Bidang Pengawasan
Unit Organisasi : Inspektorat
Sub Unit Organisasi : Inspektorat
U P B : Inspektorat

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2024	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				4.234.620.770							
2		PERALATAN DAN MESIN		4.233.620.770			3.114.768.770	164.562.775	159.519.216	3.438.659.715	794.620.655
		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1.910.492.723			1.622.248.092	34.137.071	20.194.214	1.676.779.377	233.713.346
		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		1.375.512.773			1.114.500.868	31.835.714	18.092.857	1.164.429.439	211.083.334
1.3.2.2.1.2.1	1	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	2007	124.227.273	0	0	0	0	124.227.273	0
1.3.2.2.1.2.2	2	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	2014	195.285.000	0	0	195.285.000	0	195.285.000	0
1.3.2.2.1.2.3	7	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	2015	0	0	0	364.520.500	0	364.520.500	(364.520.500)
1.3.2.2.1.2.3	3	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	2016	207.301.000	0	0	207.301.000	0	207.301.000	0
1.3.2.2.1.2.3	4	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	2017	230.850.000	0	0	217.132.141	13.742.857	230.850.000	0
1.3.2.2.1.2.3	7	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	2023	253.300.000	5	10	6.030.952	18.092.857	47.216.666	211.083.334
1.3.2.2.1.2.3	24	Miri Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	2016	364.520.500	0	0	0	0	364.520.500	0
		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			265.229.950			237.597.224	2.301.357	242.599.938	22.630.012
1.3.2.2.1.4.1	7	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	8	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	9	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	10	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	11	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	12	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	13	Sepeda Motor	12	2001	5.000.000	0	0	5.000.000	0	6.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	14	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	15	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	16	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	17	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	18	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	19	Sepeda Motor	12	2002	6.500.000	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	20	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	21	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	22	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	23	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	24	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	25	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	26	Sepeda Motor	12	2002	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	27	Sepeda Motor	12	2007	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	28	Sepeda Motor	12	2012	16.540.000	0	0	16.540.000	0	16.540.000	0
1.3.2.2.1.4.1	29	Sepeda Motor	12	2012	16.540.000	0	0	16.540.000	0	16.540.000	0
1.3.2.2.1.4.1	30	Sepeda Motor	12	2001	12.133.750	0	0	12.133.750	0	12.133.750	0
1.3.2.2.1.4.1	31	Sepeda Motor	12	2007	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0
1.3.2.2.1.4.1	31	Sepeda Motor	3	2016	0	0	0	16.452.000	0	16.452.000	(16.452.000)
1.3.2.2.1.4.1	32	Sepeda Motor	8	2014	14.845.200	0	0	14.845.200	0	14.845.200	0
1.3.2.2.1.4.1	35	Sepeda Motor	12	2022	32.719.000	4	11	4.986.274	2.301.357	9.588.569	22.630.012

1.3.2.5.2.1.3	151	Kursi Rapat	8	2023	34.333	41.200	41.200	41.200	116.733	295.267
1.3.2.5.2.1.3	152	Kursi Rapat	8	2023	34.333	41.200	41.200	41.200	116.733	295.267
1.3.2.5.2.1.3	153	Kursi Rapat	8	2023	34.333	41.200	41.200	41.200	116.733	295.267
1.3.2.5.2.1.3	1	Kursi Tamu	12	2005	2.150.000	0	0	0	2.150.000	0
1.3.2.5.2.1.3	3	Kursi Tamu	12	2008	2.876.000	0	0	0	2.876.000	0
1.3.2.5.2.1.4	1	Partisi	5	2021	1.433.600	268.800	268.800	268.800	1.971.200	716.800
1.3.2.5.2.1.4	1	Sofa	12	2021	4.510.450	451.045	451.045	451.045	2.781.444	1.729.006
1.3.2.5.2.1.4	2	Sofa	12	2021	4.510.450	451.045	451.045	451.045	2.781.444	1.729.006
1.3.2.5.2.1.4	3	Sofa	12	2022	4.510.000	451.000	451.000	451.000	1.879.167	2.630.833
1.3.2.5.2.1.4	4	Sofa	12	2022	4.510.000	451.000	451.000	451.000	1.879.167	2.630.833
1.3.2.5.2.1.4	5	Sofa	12	2022	4.510.000	451.000	451.000	451.000	1.879.167	2.630.833
1.3.2.5.2.1.4	6	Sofa	12	2022	4.510.000	451.000	451.000	451.000	1.879.167	2.630.833
1.3.2.5.2.1.4	7	Sofa	11	2023	3.890.000	389.000	389.000	389.000	907.667	2.982.333
1.3.2.5.2.1.4	8	Sofa	11	2023	3.890.000	389.000	389.000	389.000	907.667	2.982.333
1.3.2.5.2.1.4	9	Sofa	11	2023	3.890.000	389.000	389.000	389.000	907.667	2.982.333
1.3.2.5.2.1.4	10	Sofa	11	2023	3.890.000	389.000	389.000	389.000	907.667	2.982.333
1.3.2.5.2.1.4	11	Sofa	11	2023	3.890.000	389.000	389.000	389.000	907.667	2.982.333
ALAT PEMBERSIH										
1.3.2.5.2.3	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	6	2016	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1.3.2.5.2.3	1	Mesin Pemotong Rumpuk	12	2008	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
ALAT PENUNGGUN										
1.3.2.5.2.4	2	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	3	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	4	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	5	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	6	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	7	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	8	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
1.3.2.5.2.4	9	Kipas Angin	12	2005	437.500	0	0	0	437.500	0
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)										
1.3.2.5.2.6	1	Televisi	11	2021	7.000.000	1	10	263.816.689	119.574.155	104.589.033
1.3.2.5.2.6.2	1	Amplifier	5	2021	4.500.000	1	4	450.000	4.433.333	2.566.667
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	12	2007	8.400.000	0	0	0	3.300.000	1.200.000
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	11	2014	4.700.000	0	0	0	8.400.000	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	5	2021	5.260.000	1	4	526.000	4.700.000	0
1.3.2.5.2.6.8	4	Sound System	10	2024	18.900.000	4	9	526.000	3.857.333	1.402.667
1.3.2.5.2.6.8	5	Sound System	10	2024	28.750.000	4	9	0	945.000	17.985.000
1.3.2.5.2.6.1	1	Wireless	4	2018	4.336.689	0	0	0	1.437.500	27.312.500
1.3.2.5.2.6.1	2	Wireless	10	2021	9.000.000	1	9	0	4.336.689	0
1.3.2.5.2.6.1	1	Mikrofonas Floor Stand	10	2024	500.000	4	9	0	5.850.000	3.150.000
1.3.2.5.2.6.2	1	Camera Video	3	2014	12.000.000	0	0	0	25.000	475.000
1.3.2.5.2.6.5	1	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	2	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	3	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	4	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	5	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	6	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	7	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	8	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	9	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	10	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	11	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	12	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	13	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	14	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	15	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367
1.3.2.5.2.6.5	16	Karpet	3	2021	713.000	1	2	404.033	546.633	166.367

1.3.2.5.2.6.5	90	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	91	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	92	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	93	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	94	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	95	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	96	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	97	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	98	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	99	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	100	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	101	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	102	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	103	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	104	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	105	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	106	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	107	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	108	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.2.6.5	109	Gendy/n/Key	10	2021	490.000	1	9	220.500	49.000	49.000	318.500	171.500
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			172.149.568			79.650.503	8.860.400	11.210.400	99.701.303	72.448.265
1.3.2.5.3.1		MEJA KERJA PEJABAT			17.375.965			11.255.965			11.255.965	5.880.000
1.3.2.5.3.1.4	1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2020	5.880.000	0	0	0	0	0	0	5.880.000
1.3.2.5.3.1.6	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.1.6	10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	2018	1.129.597	0	0	0	0	0	1.129.597	0
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT			47.184.000			25.794.269	4.568.400	4.568.400	34.931.069	12.252.931
1.3.2.5.3.3.4	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12	2005	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.3.3.4	8	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	2020	4.000.000	0	2	3.066.667	400.000	400.000	3.066.667	133.333
1.3.2.5.3.3.4	9	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	11	2022	7.674.000	2	10	1.790.600	767.400	767.400	3.325.400	4.348.600
1.3.2.5.3.3.5	7	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.5	8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.5	9	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.5	10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.5	11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.5	12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2020	2.490.000	0	2	1.909.000	249.000	249.000	2.407.000	83.000
1.3.2.5.3.3.9	21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2021	1.835.000	1	2	1.039.833	183.500	183.500	1.406.833	428.167
1.3.2.5.3.3.9	22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2021	1.835.000	1	2	1.039.833	183.500	183.500	1.406.833	428.167
1.3.2.5.3.3.9	23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.3.9	30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2022	1.925.000	2	1	1.122.917	192.500	192.500	1.122.917	802.083
1.3.2.5.3.5		KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT			37.480.000			31.067.998	2.748.000	2.748.000	36.563.998	916.002
1.3.2.5.3.5.7	1	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	2	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0

1.3.2.5.3.5.7	3	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	4	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	6	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	7	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	8	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	9	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.7	10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2016	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.3.5.8	1	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	2	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	3	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	4	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	6	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.590.000	0	2	1.525.667	199.000	199.000	1.923.667	66.333	66.333	1.923.667	66.333
1.3.2.5.3.5.8	7	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	8	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	9	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	12	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	13	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	14	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	16	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.5.8	18	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	2020	1.295.000	0	2	992.833	129.500	129.500	1.251.833	43.167	43.167	1.251.833	43.167
1.3.2.5.3.7		LEMBAR DAN AKSIP PEJABAT			70.309.602			11.472.270	1.544.000	3.694.000	16.910.270	53.399.332	0		
1.3.2.5.3.7	1	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2013	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0
1.3.2.5.3.7	2	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2013	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0
1.3.2.5.3.7	3	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2013	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0
1.3.2.5.3.7	4	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2013	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0	0	1.967.401	0
1.3.2.5.3.7	5	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2022	3.860.000	2	10	900.667	386.000	386.000	1.672.667	2.187.333	2.187.333	1.672.667	2.187.333
1.3.2.5.3.7	6	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2022	3.860.000	2	10	900.667	386.000	386.000	1.672.667	2.187.333	2.187.333	1.672.667	2.187.333
1.3.2.5.3.7	7	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2022	3.860.000	2	10	900.667	386.000	386.000	1.672.667	2.187.333	2.187.333	1.672.667	2.187.333
1.3.2.5.3.7	8	Lemari Buku Aksip Untuk Aksip Dinamis	11	2022	3.860.000	2	10	900.667	386.000	386.000	1.672.667	2.187.333	2.187.333	1.672.667	2.187.333
1.3.2.5.3.7	1	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	8.420.000	4	9	0	0	0	421.000	7.999.000	6.108.500	6.108.500	0
1.3.2.5.3.7	2	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.5.3.7	3	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.5.3.7	4	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.5.3.7	5	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.5.3.7	6	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.5.3.7	7	Lemari Aksip Pejabat lainnya	10	2024	6.430.000	4	9	0	0	0	321.500	6.108.500	6.108.500	0	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			31.500.000			7.520.005	2.790.000	3.150.000	13.460.005	18.039.995	0		
1.3.2.6.1		PERALATAN STUDIO AUDIO			31.500.000			7.520.005	2.790.000	3.150.000	13.460.005	18.039.995	0		
1.3.2.6.1.1	1	Microphone/Wireless MIC	5	2021	7.500.000	1	4	4.000.000	750.000	750.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000	2.000.000
1.3.2.6.1.1.3	1	Microphone/Wireless MIC	7	2024	3.600.000	4	6	0	0	0	3.600.000	3.240.000	3.240.000	0	0
1.3.2.6.1.1.4	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	4	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333
1.3.2.6.1.1.4	7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	2022	1.000.000	2	11	216.667	100.000	100.000	416.667	583.333	583.333	216.667	583.333

1.3.2.10.2.2.	4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	10	2018	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.2.	5	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	2018	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.10.2.2.	1	Speaker Komputer	11	2023	5.058.000	2	10	210.750	632.250	632.250	1.475.250	3.582.750
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			173.378.793			113.449.213	12.338.613	13.205.184	138.993.010	34.385.783
1.3.2.10.2.3.	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	862.068	0	0	862.068	0	0	862.068	0
1.3.2.10.2.3.	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2015	7.606.481	0	0	7.606.481	0	0	7.606.481	0
1.3.2.10.2.3.	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	2.457.680	0	0	2.457.680	0	0	2.457.680	0
1.3.2.10.2.3.	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2018	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
1.3.2.10.2.3.	39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2018	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0
1.3.2.10.2.3.	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2018	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0
1.3.2.10.2.3.	41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2018	9.675.000	0	0	9.675.000	0	0	9.675.000	0
1.3.2.10.2.3.	42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	-1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	1.860.000	0	0	1.433.750	232.500	193.750	1.860.000	0
1.3.2.10.2.3.	51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2020	2.449.700	0	0	1.888.310	306.213	255.177	2.449.700	0
1.3.2.10.2.3.	52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021	6.300.000	0	2	4.462.500	787.500	787.500	6.037.500	262.500
1.3.2.10.2.3.	53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021	3.045.000	0	2	2.156.875	380.625	380.625	2.918.125	126.875
1.3.2.10.2.3.	54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021	3.045.000	0	2	2.156.875	380.625	380.625	2.918.125	126.875
1.3.2.10.2.3.	55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021	3.045.000	0	2	2.156.875	380.625	380.625	2.918.125	126.875
1.3.2.10.2.3.	56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021	3.045.000	0	2	2.156.875	380.625	380.625	2.918.125	126.875
1.3.2.10.2.3.	57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2021	2.600.000	0	10	1.408.333	325.000	325.000	2.058.333	541.667
1.3.2.10.2.3.	58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2022	3.500.000	1	10	1.020.833	437.500	437.500	1.895.833	1.604.167
1.3.2.10.2.3.	59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2022	3.500.000	1	11	947.917	437.500	437.500	1.822.917	1.677.083
1.3.2.10.2.3.	65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2024	5.189.200	3	3	0	324.325	648.650	972.975	4.216.225
1.3.2.10.2.3.	66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2024	5.189.200	3	3	0	324.325	648.650	972.975	4.216.225
1.3.2.10.2.3.	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2021	24.850.000	0	1	18.119.792	3.106.250	3.106.250	24.332.292	517.708
1.3.2.10.2.3.	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	2024	7.800.000	3	3	0	487.500	975.000	1.462.500	6.337.500
1.3.2.10.2.3.	1	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	2024	1.000.000	3	11	0	0	20.833	20.833	979.167
1.3.2.10.2.3.	2	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	2024	1.000.000	3	11	0	0	20.833	20.833	979.167
1.3.2.10.2.3.	3	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	2024	1.000.000	3	11	0	0	20.833	20.833	979.167
1.3.2.10.2.3.	4	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	2024	1.000.000	3	11	0	0	20.833	20.833	979.167
1.3.2.10.2.3.	5	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	2024	2.250.000	3	11	0	0	46.875	46.875	2.203.125

**DAFTAR PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPP	STS KWN JMLH JIWA	P E N G H A S I L A N					P O T O N G A N			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GJ. FOKOK TJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESE - FUNG. UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TJ. TERPENCIL TKD TJ. BERAS TJ. PAJAK	TJ. BPJS KES PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. IWP 1% POT. IWP 8% POT. TAPERUM	HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH POTONGAN			
1	MASKUR, S.Sos 29-08-1972 NIP. 197203291992111001 Pembina-4A Desember 2024 IX XP	IX	K-1	5,289,800	1,260,000	0	0	0	0	0	6,735,200
			2	528,960	0	0	162	72,901	0	0	0
			4	211,592	0	0	7,290,534	482,430	0	0	0
				6,030,372	0	0	0	0	535,534	0	0
				5,075,200	1,260,000	0	0	0	0	0	6,512,500
				507,520	0	0	87	70,457	0	0	0
				203,008	0	0	7,045,813	462,658	0	0	0
				5,785,728	0	0	0	0	533,315	0	0
				214,600	0	0	0	0	0	0	222,700
				21,460	0	0	75	2,447	0	0	0
	8,584	0	0	244,719	19,572	0	0	0			
	244,644	0	0	0	0	22,019	0	0			
	214,600	0	0	0	0	0	0	222,700			
	21,460	0	0	75	2,447	0	0	0			
	8,584	0	0	244,719	19,572	0	0	0			
	244,644	0	0	0	0	22,019	0	0			
TOTAL GOL III			214,600	0	0	0	0	0	0	0	
PEG 1			21,460	0	0	75	2,447	0	0	0	
IST 2			8,584	0	0	244,719	19,572	0	0	0	
ANK 2			244,644	0	0	0	0	22,019	0	222,700	

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / COLONGAN NPIVP	STS XWN JMLH JWA	PENGHASILAN					POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GJ. PKOK	TUNJ. ESE	TJ. TERPENCIL	TJ. BPJS KES	POT. PAJAK	HUTANG/LAIN2	JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING		
			TJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	FUNG. UMUM TJ. Fungsional TJ. KHUSUS	TKD TJ. PERAS TJ. PAJAK	PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. BP/PLK POT. IHT/8% POT. TAPERUM	BULOG SEWA RUMAH POTONGAN			
2	BAIQ DITA MARISADINAERDIANI, S.STP 25-05-1995 NIP. 19950525020082001 Pemb. Muda TK-I - 3B	TK-0 0 1	3,089,300 0 0 3,089,300 3,089,300 0 0 3,089,300	0 0 540,000 0 0 185,000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 137 3,629,437 0 87 3,274,387 0	0 36,253 287,144 0 32,743 287,144 0	0 0 0 283,437 0 0 279,887	3,346,000 0 0 2,994,500 0 0 0		
		1X	0 0 0 0 0 0 0	0 0 353,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 50 353,050 0 200 1,420,200 0	0 3,530 0 0 14,200 0 14,200	0 0 0 5,550 0 0 0	551,500 0 0 1,406,000 0 0 0		
	Sepember s.d Desember 2024 TURUNG	4X	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
3	RINA BUDIANA, SE 25-03-1995 NIP. 199503250200722018 Pemb. Muda TK-I - 3B	K-1 1 3	3,083,300 303,590 61,786 3,460,016 2,873,500 287,350 57,470 3,218,320	0 185,000 0 0 0 185,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 133 3,645,151 0 0 79 3,403,399 0	0 36,450 276,801 0 0 34,033 257,466 0	0 0 0 313,251 0 0 0 291,499	3,331,900 0 0 3,111,900 0 0 0 0		
		1X	215,600 21,550 4,316 241,696 215,800 21,550 4,316 241,696	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 56 241,752 0 0 56 241,752 0	0 2,417 19,335 0 0 2,417 19,335 0	0 0 0 21,752 0 0 0 21,752	220,000 0 0 0 220,000 0 0 0		
	Desember 2024 KF	1X	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
			215,600 21,550 4,316 241,696	0 0 1,420,000 0	0 0 0 0	0 256 1,651,532 0	0 16,617 19,335 0	0 0 0 0	0 0 0 1,626,000		

DAFTAR
KWITANSI NOMOR
KODE REKENING
TAHUN ANGGARAN

PEMBAYARAN TPP BULAN DESEMBER 2024 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
An. Drs. H. Lulu Akmal Afandi, MM, Dkk.

S.1.1.02.04
2025

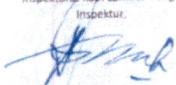
NO	W A M A	GOL	JABATAN	Eselon	Jumlah Terima TPP	Jml Bulan	Jml Terima	Potongan Keaktifan	Jumlah Terima setelah potongan	PPH Pd 21	Jumlah	Pot. BPJS	Jumlah Terima	TANDA	TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Drs. H. Lulu Akmal Afandi, MM	IV/c	Inspektur	II/b	Rp. 13.600,000	1 x	Rp. 13.600,000	Rp. 108,800	Rp. 13.491,200	Rp. 2.023,680	Rp. 11.467,520	Rp. 108,159	Rp. 11.359,361	1	
2	Hj. Baiq Siti Darmayanti, SE, M.Acc	IV/b	Sekretaris	III/a	Rp. 7.608,000	1 x	Rp. 7.608,000	Rp. 30,432	Rp. 7.577,568	Rp. 1.136,635	Rp. 6.440,933	Rp. 146,811	Rp. 6.294,122	2	
3	Dra. Suhada	IV/b	Irbani IV	III/a	Rp. 6.882,000	1 x	Rp. 6.882,000	Rp. -	Rp. 6.882,000	Rp. 1.032,300	Rp. 5.849,700	Rp. 158,508	Rp. 5.691,192	3	
4	Dafina Fatana, SE, M.Acc	IV/b	Irbani III	III/a	Rp. 6.882,000	1 x	Rp. 6.882,000	Rp. 137,640	Rp. 6.744,360	Rp. 1.011,654	Rp. 5.732,706	Rp. 152,169	Rp. 5.580,537	4	
5	Lalu Yusuf Anshary, ST	IV/b	Irbani II	III/a	Rp. 6.882,000	1 x	Rp. 6.882,000	Rp. 220,224	Rp. 6.661,776	Rp. 999,266	Rp. 5.662,510	Rp. 162,390	Rp. 5.500,120	5	
6	Miskur, S.Sos	IV/a	Irbani I	III/a	Rp. 6.882,000	1 x	Rp. 6.882,000	Rp. -	Rp. 6.882,000	Rp. 1.032,300	Rp. 5.849,700	Rp. 152,163	Rp. 5.697,537	6	
7	Iwan Yulianto, SE	IV/b	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 145,236	Rp. 6.770,764	Rp. 1.015,615	Rp. 5.755,149	Rp. 151,611	Rp. 5.603,538	7	
8	Hj. Anita Indriani, SH	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 62,244	Rp. 6.853,756	Rp. 1.028,063	Rp. 5.825,693	Rp. 157,608	Rp. 5.668,085	8	
9	Sahabudin, SH	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 186,732	Rp. 6.729,268	Rp. 1.009,390	Rp. 5.719,878	Rp. 132,189	Rp. 5.587,689	9	
10	Sapta Sayogo, SH	IV/b	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 110,656	Rp. 6.805,344	Rp. 1.020,802	Rp. 5.784,542	Rp. 141,267	Rp. 5.643,275	10	
11	M. Aminudin, SP	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 152,152	Rp. 6.763,848	Rp. 1.014,577	Rp. 5.749,271	Rp. 145,911	Rp. 5.603,360	11	
12	Baiq Husnul Hotimah, S.Sos	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 6,916	Rp. 6.909,084	Rp. 1.036,363	Rp. 5.872,721	Rp. 149,073	Rp. 5.723,648	12	
13	Muh. Amrullah, SE	IV/c	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 132,735	Rp. 5.745,865	13	
14	La b e k, S.Sos	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 145,911	Rp. 5.732,689	14	
15	Widawan, S.IP	IV/a	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 55,328	Rp. 6.860,672	Rp. 1.029,101	Rp. 5.831,571	Rp. 167,979	Rp. 5.663,592	15	
16	Prayudia Wardani, SE	IV/b	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 166,371	Rp. 5.712,229	16	
17	Erma Wahyuni, SKM	IV/b	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 55,328	Rp. 6.860,672	Rp. 1.029,101	Rp. 5.831,571	Rp. 180,885	Rp. 5.650,686	17	
18	Naily Indriaty, SE, M.Si	IV/b	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 110,656	Rp. 6.805,344	Rp. 1.020,802	Rp. 5.784,542	Rp. 177,849	Rp. 5.606,693	18	
19	Muhamad Iswandi, SE	IV/b	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 48,412	Rp. 6.867,588	Rp. 1.030,138	Rp. 5.837,450	Rp. 172,071	Rp. 5.665,379	19	
20	Subardan, S.Sos	IV/a	Auditor Muda	-	Rp. 4.651,000	1 x	Rp. 4.651,000	Rp. 83,718	Rp. 4.567,282	Rp. 685,092	Rp. 3.882,190	Rp. 139,530	Rp. 3.742,660	20	
21	I Nyoman Budiarta, BA	IV/a	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 139,511	Rp. 5.739,089	21	
22	Uya Maryati, S. Far	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 6,916	Rp. 6.909,084	Rp. 1.036,363	Rp. 5.872,721	Rp. 202,002	Rp. 5.670,719	22	
23	Bambang, S.Sos	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 152,152	Rp. 6.763,848	Rp. 1.014,577	Rp. 5.749,271	Rp. 188,307	Rp. 5.560,964	23	
24	Sulistyawati, S.IP	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 204,453	Rp. 5.674,147	24	
25	I Ketut Budiarta, ST	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 6,916	Rp. 6.909,084	Rp. 1.036,363	Rp. 5.872,721	Rp. 187,296	Rp. 5.685,425	25	
26	Budi Iaksono, SE	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. 62,244	Rp. 6.853,756	Rp. 1.028,063	Rp. 5.825,693	Rp. 187,296	Rp. 5.638,397	26	
27	Zaenul Wardi, S. Sos	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 161,682	Rp. 5.716,918	27	
28	Yuliana Maria, SE	IV/a	Auditor Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 187,296	Rp. 5.691,304	28	
29	Lale Rozika Zahara, S.Sos	IV/a	Pengawas Madya	-	Rp. 6.916,000	1 x	Rp. 6.916,000	Rp. -	Rp. 6.916,000	Rp. 1.037,400	Rp. 5.878,600	Rp. 179,727	Rp. 5.698,873	29	
30	Sri Sapti Hamelaningsih, S.Hut, M.Ak	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4.651,000	1 x	Rp. 4.651,000	Rp. -	Rp. 4.651,000	Rp. 732,550	Rp. 4.418,450	Rp. 139,530	Rp. 4.278,920	30	
Jumlah Jalan					Rp. 210,190,000		Rp. 210,190,000	Rp. 1,742,702	Rp. 208,447,298	Rp. 30,801,995	Rp. 177,645,303	Rp. 4,818,290	Rp. 172,827,013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Jalan			210,190,000		210,190,000	Rp. 1,742,702	Rp. 208,447,298	Rp. 30,801,995	Rp. 177,645,303	Rp. 4,818,290	Rp. 172,827,013	
31	Sulman	III/d	Auditor Penyelia	-	Rp. 3,552,000	1 x	Rp. 3,552,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 177,600	Rp. 3,374,400	Rp. 106,560	Rp. 3,267,840	31
32	Dewy Erwina Indriastuti, SE	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,900	32
33	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d	Pengawas Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 134,879	Rp. 4,516,121	Rp. 225,806	Rp. 4,290,315	Rp. 139,550	Rp. 4,150,765	33
34	Ana Fatmawati, ST, M.Ak	III/d	Pengawas Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,900	34
35	Mila Nurmawati, SE, M.Ak	III/d	Perencana Ahli Muda	-	Rp. 3,552,000	1 x	Rp. 3,552,000	Rp. 31,968	Rp. 3,520,032	Rp. 176,002	Rp. 3,344,030	Rp. 106,560	Rp. 3,237,470	35
36	Aluh Usbanhart, ST	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 4,651	Rp. 4,646,349	Rp. 232,317	Rp. 4,414,032	Rp. 139,550	Rp. 4,274,502	36
37	Roni Hamdani, S.Hut	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 9,302	Rp. 4,641,698	Rp. 232,085	Rp. 4,409,613	Rp. 139,550	Rp. 4,270,063	37
38	Lale Budia Zoriani, SE	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,920	38
39	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,920	39
40	Baig Afis Linda Yunsayanti, S.PI	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,920	40
41	Balaq Novi Fatma Nurbaucini, SE	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 93,020	Rp. 4,557,980	Rp. 232,550	Rp. 4,330,431	Rp. 139,550	Rp. 4,190,551	41
42	Bq. Vera Febrina Angri S.Ferm	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 51,161	Rp. 4,599,839	Rp. 232,889	Rp. 4,369,847	Rp. 139,550	Rp. 4,230,317	42
43	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 74,416	Rp. 4,576,584	Rp. 232,829	Rp. 4,347,755	Rp. 139,550	Rp. 4,208,225	43
44	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 88,369	Rp. 4,562,631	Rp. 232,437	Rp. 4,334,499	Rp. 139,550	Rp. 4,194,969	44
45	Lalu Abdul Wasit, S.IP	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 41,859	Rp. 4,609,141	Rp. 230,457	Rp. 4,378,684	Rp. 139,550	Rp. 4,239,154	45
46	Taufikurrahman Ishadi, SE	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 43,859	Rp. 4,609,141	Rp. 230,457	Rp. 4,378,684	Rp. 139,550	Rp. 4,239,154	46
47	Muhammad Rifai, S.Adm	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 37,208	Rp. 4,613,792	Rp. 230,680	Rp. 4,383,102	Rp. 139,550	Rp. 4,243,572	47
48	Fathul Jawadi, M.Ak	III/d	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 186,040	Rp. 4,464,960	Rp. 232,550	Rp. 4,241,712	Rp. 139,550	Rp. 4,102,182	48
49	Lalu Syamsul Hadi, ST, M.Ak	III/d	Pengawas Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 232,550	Rp. 4,418,450	Rp. 139,550	Rp. 4,278,920	49
50	Siti Badriyah, A.Md	III/d	Auditor Penyelia	-	Rp. 3,552,000	1 x	Rp. 3,552,000	Rp. 3,552	Rp. 3,548,448	Rp. 177,412	Rp. 3,371,026	Rp. 106,560	Rp. 3,264,466	50
51	Rita Dwi Purwanthy, SH	III/c	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 4,651	Rp. 4,646,349	Rp. 232,317	Rp. 4,414,032	Rp. 139,550	Rp. 4,274,502	51
52	Arihfy, SE	III/b	Auditor Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 13,008	Rp. 3,238,992	Rp. 163,950	Rp. 3,077,042	Rp. 97,560	Rp. 2,979,482	52
53	Agustina Lindawati, SE	III/b	Auditor Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 163,950	Rp. 3,089,400	Rp. 97,560	Rp. 2,991,840	53
54	Samsu Haidi, ST	III/c	Auditor Muda	-	Rp. 4,651,000	1 x	Rp. 4,651,000	Rp. 106,973	Rp. 4,544,027	Rp. 227,201	Rp. 4,316,826	Rp. 139,550	Rp. 4,177,296	54
55	Sahruman Anwar, SIP	III/b	Auditor Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 26,016	Rp. 3,225,984	Rp. 163,289	Rp. 3,064,685	Rp. 97,560	Rp. 2,967,125	55
56	Moh. Tajudin, ST	III/b	Auditor Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 84,552	Rp. 3,167,448	Rp. 158,372	Rp. 3,009,076	Rp. 97,560	Rp. 2,911,516	56
57	Muhammad Amrillah, S.STP	III/b	Kasubbag Adum	IV	Rp. 3,650,000	1 x	Rp. 3,650,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 182,500	Rp. 3,467,500	Rp. 109,500	Rp. 3,358,000	57
58	Louch Saufi Gani, S	III/b	Bendahara	-	Rp. 2,007,000	1 x	Rp. 2,007,000	Rp. 16,056	Rp. 1,990,944	Rp. 98,547	Rp. 1,891,397	Rp. 60,210	Rp. 1,831,187	58
59	Muhammad Ghozali Urangganu	III/b	Pengelola Data	-	Rp. 1,744,000	1 x	Rp. 1,744,000	Rp. 3,488	Rp. 1,740,512	Rp. 87,026	Rp. 1,653,486	Rp. 57,320	Rp. 1,601,166	59
60	Sri Junih, S.IP	III/a	Pengawas Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 48,780	Rp. 3,203,220	Rp. 160,161	Rp. 3,043,059	Rp. 97,560	Rp. 2,945,499	60
61	Lala Lely Yulita, S.IP	III/b	Pengawas Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 162,600	Rp. 3,089,400	Rp. 97,560	Rp. 2,991,840	61
62	Bq. Nunik Hartati, SE	III/a	Lanjutan	-	Rp. 2,867,000	1 x	Rp. 2,867,000	Rp. 114,680	Rp. 2,752,320	Rp. 137,616	Rp. 2,614,704	Rp. 86,010	Rp. 2,528,694	62
63	Bayu Prayitno, S.IP	III/a	Pengawas Pertama	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 100,812	Rp. 3,151,188	Rp. 157,559	Rp. 2,993,629	Rp. 97,560	Rp. 2,896,069	63
64	Santiko, S.IP	III/b	Pengadministrasi Umum	-	Rp. 1,744,000	1 x	Rp. 1,744,000	Rp. 6,976	Rp. 1,737,024	Rp. 86,851	Rp. 1,650,173	Rp. 52,320	Rp. 1,597,853	64
65	Lala Nisban Atwiwibowo, ST	III/a	Ahli Pertama-Auditor	-	Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 52,032	Rp. 3,199,968	Rp. 159,998	Rp. 3,039,970	Rp. 97,560	Rp. 2,942,410	65
		Jumlah Jalan			Rp. 3,472,433,100		Rp. 3,472,433,100	Rp. 3,119,010	Rp. 344,123,990	Rp. 37,583,329	Rp. 306,538,161	Rp. 8,923,880	Rp. 297,608,281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah jalan					347,243,000		347,243,000	Rp. 3,119,010	Rp. 344,123,990	Rp. 37,585,829	Rp. 306,538,161	Rp. 8,929,880	Rp. 297,608,281	
66	Rina Budiana, SE	III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Rp. 2,007,000	1 x	Rp. 2,007,000	Rp. 1,204,200	Rp. 802,800	Rp. 40,140	Rp. 762,660	Rp. 60,210	Rp. 702,450	
67	Muh. Nanda Pratama, S STP	III/b	Pengawas Pertama		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 143,088	Rp. 3,108,912	Rp. 155,446	Rp. 2,953,466	Rp. 97,560	Rp. 2,855,906	67
68	Baiq Dita Marsadina Erdani, S STP	III/b	Pengawas Pertama		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 52,032	Rp. 3,199,968	Rp. 199,998	Rp. 3,039,970	Rp. 97,560	Rp. 2,942,410	68
69	Dina Marlina, SE	III/a	Ahli Pertama-Auditor		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 325,200	Rp. 2,926,800	Rp. 146,340	Rp. 2,780,460	Rp. 97,560	Rp. 2,682,900	69
70	Anif Rahmansyah, S.Ak	III/a	Ahli Pertama-Auditor		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 3,252	Rp. 3,252,000	Rp. 162,600	Rp. 3,089,400	Rp. 97,560	Rp. 2,991,840	70
71	Yesti Maesarah, SE	III/a	Pengawas		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 16,260	Rp. 3,248,748	Rp. 162,437	Rp. 3,086,311	Rp. 97,560	Rp. 2,988,751	71
72	Ina Sarah Mia, SM	III/a	Ahli Pertama-Auditor		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 16,260	Rp. 3,235,740	Rp. 161,787	Rp. 3,073,953	Rp. 97,560	Rp. 2,976,393	72
73	Muhammad Anwar Insaduddin	III/a	Ahli Pertama-Auditor		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 16,260	Rp. 3,235,740	Rp. 161,787	Rp. 3,073,953	Rp. 97,560	Rp. 2,976,393	73
74	Eka Kumari Dewi, S.Akunt	III/a	Pengawas		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 16,260	Rp. 3,235,740	Rp. 161,787	Rp. 3,073,953	Rp. 97,560	Rp. 2,976,393	74
75	Huswaton Hasamah, SE	III/a	Pengawas		Rp. 3,252,000	1 x	Rp. 3,252,000	Rp. 62,784	Rp. 1,681,216	Rp. 84,061	Rp. 1,597,155	Rp. 52,320	Rp. 1,544,835	75
76	Marjan	III/a	LHP		Rp. 1,744,000	1 x	Rp. 1,744,000	Rp. 24,416	Rp. 1,719,584	Rp. 1,381,300	Rp. 33,570	Rp. 1,347,774	Rp. 1,314,204	76
77	Muhammad	III/a	Pengadministrasi Umum		Rp. 1,454,000	1 x	Rp. 1,454,000	Rp. 24,416	Rp. 1,454,000	Rp. 72,700	Rp. 1,381,300	Rp. 43,620	Rp. 1,337,680	77
78	Baiq Noviana Widiastuti	II/c	Barang Milik Daerah		Rp. 1,744,000	1 x	Rp. 1,744,000	Rp. 10,464	Rp. 1,733,536	Rp. 1,719,584	Rp. 1,719,584	Rp. 52,320	Rp. 1,667,264	78
79	Lalu Muhammad Khadafi	II/c	Pengadministrasi Umum		Rp. 1,744,000	1 x	Rp. 1,744,000	Rp. 10,464	Rp. 1,733,536	Rp. 1,733,536	Rp. 1,733,536	Rp. 52,320	Rp. 1,681,216	79
80	Mahdan	II/a	Pengemudi		Rp. 1,119,000	1 x	Rp. 1,119,000	Rp. 1,119,000	Rp. 1,119,000	Rp. 1,119,000	Rp. 1,119,000	Rp. 33,570	Rp. 1,085,430	80
					Rp. 386,323,000		Rp. 386,323,000	Rp. 4,976,966	Rp. 381,346,034	Rp. 39,218,326	Rp. 342,127,708	Rp. 10,102,280	Rp. 332,025,428	

(Tiga ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

Mengenal:
Inspektur Kab. Lombok Tengah
Inspektur.



Drs. H. Lalu Abnail Fandi, MM
NIP. 196812311989031065

Praya, Januari 2025

Bendahara Pengeluaran,



Loush Syaifi Hani S.
Nip. 197012242001121002

PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024


01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	0,00	14.461.368.085,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	0,00	14.097.196.085,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.661.762.659,00	11.574.793.825,00	0,00	10.564.214.417,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.619.731,00	6.195.565.104,00	0,00	5.755.858.870,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.647.627.059,00	4.614.266.779,00	0,00	4.239.887.440,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	433.169.428,00	421.851.040,00	0,00	393.687.198,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	433.169.428,00	421.851.040,00	0,00	393.687.198,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00	130.230.000,00	0,00	139.230.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.230.000,00	130.230.000,00	0,00	139.230.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	761.370.000,00	752.605.000,00	0,00	675.720.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	761.370.000,00	752.605.000,00	0,00	675.720.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.755.000,00	27.675.000,00	0,00	47.010.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.755.000,00	27.675.000,00	0,00	47.010.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	229.671.400,00	229.136.880,00	0,00	232.613.040,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	229.671.400,00	229.136.880,00	0,00	232.613.040,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.715.874,00	19.736.183,00	0,00	27.650.517,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.715.874,00	19.736.183,00	0,00	27.650.517,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.970,00	64.222,00	0,00	60.675,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.970,00	64.222,00	0,00	60.675,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	0,00	4.804.743.547,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	0,00	4.804.743.547,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.406.330.928,00	5.374.416.721,00	0,00	4.804.743.547,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.812.000,00	4.812.000,00	0,00	3.612.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pen	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Mer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.005.016.148,00	3.895.646.881,00	0,00	3.532.981.668,00
5.1.02.01	Belanja Barang	737.762.808,00	716.296.900,00	0,00	552.769.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	737.762.808,00	716.296.900,00	0,00	552.769.250,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	266.009.325,00	246.885.650,00	0,00	236.086.150,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.972.082,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.981.949,00	93.876.900,00	0,00	83.711.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.085.213,00	3.083.850,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35.639.453,00	35.533.100,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.386.130,00	45.264.400,00	0,00	30.825.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.404.960,00	7.404.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.408.696,00	10.374.000,00	0,00	7.686.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	272.875.000,00	272.875.000,00	0,00	194.480.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.004.340,00	644.674.610,00	0,00	582.163.604,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	526.880.540,00	504.183.080,00	0,00	489.280.675,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.770.000,00	46.370.000,00	0,00	31.560.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	441.750.000,00	428.950.000,00	0,00	432.340.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.360.540,00	10.863.080,00	0,00	7.380.675,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	432.000,00	431.530,00	0,00	324.719,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	190.728,00	190.728,00	0,00	144.105,00

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	241.272,00	240.802,00		180.614,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.556.800,00	48.000.000,00	0,00	16.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.556.800,00	48.000.000,00		16.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.250.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	8.000.000,00	5.000.000,00		1.250.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	89.135.000,00	87.060.000,00	0,00	74.508.210,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	36.555.000,00	34.480.000,00		47.708.210,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	32.580.000,00	32.580.000,00		6.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	59.460.000,00	59.150.000,00	0,00	32.999.545,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	32.999.545,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.500.000,00	48.500.000,00		32.999.545,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.960.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	10.960.000,00	10.650.000,00		0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.534.789.000,00	2.475.525.371,00	0,00	2.365.049.269,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.534.789.000,00	2.475.525.371,00	0,00	2.365.049.269,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	319.329.000,00	288.315.371,00		147.549.269,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.215.460.000,00	2.187.210.000,00		2.217.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.666.778.807,00	15.470.440.706,00	0,00	14.097.196.085,00
5.2	BELANJA MODAL	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	253.300.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				253.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	0,00	68.614.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.615.450,00	92.500.000,00	0,00	68.614.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	47.093.450,00	47.000.000,00		68.614.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.522.000,00	45.500.000,00		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Perekaman	52.702.832,00	51.750.000,00	0,00	5.058.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	52.702.832,00	51.750.000,00	0,00	5.058.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.446.526,00	22.500.000,00		5.058.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.750.000,00	28.750.000,00		
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	506.306,00	500.000,00		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	69.795.075,00	67.628.400,00	0,00	37.200.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	47.246.400,00	47.200.000,00	0,00	37.200.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.246.400,00	47.200.000,00		37.200.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.548.675,00	20.428.400,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.548.675,00	20.428.400,00		
	JUMLAH BELANJA MODAL	215.113.357,00	211.878.400,00	0,00	364.172.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.881.892.164,00	15.682.319.106,00	0,00	14.461.368.085,00
	SURPLUS/DEFISIT	-15.881.892.164,00	-15.682.319.106,00	0,00	-14.461.368.085,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-15.881.892.164,00	-15.682.319.106,00	0,00	-14.461.368.085,00

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024

Inspektoral



Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
NIP.196812311989031065

NERACA KONSOLIDASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	NERACA 2024	Penyesuaian		NERACA 2023
			Debet	Kredit	
	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.01	Kas dan Setara Kas				
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran				
1.1.12	Persediaan	454.000,00			737.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	454.000,00			737.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	454.000,00			737.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	454.000,00	454.000,00	737.000,00	737.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	454.000,00			737.000,00
1.3	ASET TETAP				
1.3.01	Tanah				
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.233.680.769,75	211.878.400,00		4.021.802.369,75
1.3.07.01	Akm peny peralatan dan mesin	(3.438.850.714,75)		324.081.995,00	(3.114.768.719,75)
1.3.03	Gedung dan Bangunan				
1.3.07.02	Akm peny gedung dan bangunan				
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jembatan				
1.3.07.03	Akm peny jalan, irigasi dan jembatan				
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	940.000,00			940.000,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan				
	JUMLAH ASET TETAP	795.770.055,00			907.973.650,00
1.6	PROPERTI INVESTASI				
1.6.01	Properti Investasi Tanah				
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan				
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi				
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan				
	JUMLAH DANA CADANGAN				
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang				
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.5.01.02.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd PN Bukan Bendahar				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd Pihak Ketiga				
	Penyisihan TGR				
1.5.03	Aset Tak Berwujud				
1.5.03.01.01.0005	Aset Tak Berwujud Lainnya				
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya				
1.5.04	Aset Lain-lain				
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang				
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemer				
1.5.08.01.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				

1.5.08.01.01.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-				-
1.5.08.01.01.0001	Dana Bagi Hasil TDF	-				-
	JUMLAH ASET LAINNYA					
	RK - SIKPD					
	TOTAL ASET	796.224.055,00				908.710.650,00
2	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.06	Utang Belanja	383.355.891,00				401.502.637,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	383.355.891,00				401.502.637,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.009.857,00				20.152.924,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	520.900,00	11.334.380,00	520.900,00		11.334.380,00
2.1.06.01.01.0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	-				
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Kel	68.610,00	50.946,00	68.610,00		50.946,00
2.1.06.01.01.0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Kel	-				
2.1.06.01.01.0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jaba	-				
2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan F	1.420.000,00	8.765.000,00	1.420.000,00		8.765.000,00
2.1.06.01.01.0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunj	-				
2.1.06.01.01.0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunj	-				
2.1.06.01.01.0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras P	-				
2.1.06.01.01.0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras P	-				
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-	-				
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji P	347,00	2.598,00	347,00		2.598,00
2.1.06.01.01.0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji P	-				
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	381.346.034,00				381.349.713,00
2.1.06.01.02.0001	Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	381.346.034,00	381.349.713,00	381.346.034,00		381.349.713,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	383.355.891,00				401.502.637,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-				-
	TOTAL KEWAJIBAN	383.355.891,00				401.502.637,00
	EKUITAS					
	TOTAL EKUITAS	412.868.164,00				507.208.013,00
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	796.224.055,00				908.710.650,00

Kode Rekening	Uraian	LRA RINCI	PENYESUAIAN		LO 2024
			D	K	
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00			0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00			0,00
7.1.01	Pajak Daerah-LO	0,00			0,00
8	BEBAN	15.470.440.706,00			15.776.658.955,00
8.1	BEBAN OPERASI	15.470.440.706,00			15.452.576.960,00
8.1.01	Beban Pegawai	11.573.593.825,00			11.555.447.079,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.195.565.104,00			6.177.422.037,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	4.614.266.779,00			4.603.453.299,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.614.266.779,00	520900	11334380	4.603.453.299,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK				0,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	421.851.040,00			421.868.704,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	421.851.040,00	68610	50946	421.868.704,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK				0,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	130.230.000,00			130.230.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	130.230.000,00			130.230.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	752.605.000,00			745.260.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	752.605.000,00	1420000	8765000	745.260.000,00
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK				0,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.675.000,00			27.675.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.675.000,00			27.675.000,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK				0,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	229.136.880,00			229.136.880,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	229.136.880,00			229.136.880,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK				0,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.736.183,00			19.736.183,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.736.183,00			19.736.183,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	64.222,00			61.971,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	64.222,00	347	2598	61.971,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK				0,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00			0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS				0,00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				0,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00			0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				0,00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				0,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00			0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS				0,00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK				0,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.374.416.721,00			5.374.413.042,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.374.416.721,00			5.374.413.042,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.374.416.721,00	381346034	381.349.713,00	5.374.413.042,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0			0
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0			0,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	3.612.000,00			3.612.000,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	3.612.000,00			3.612.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.612.000,00			3.612.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.896.846.881,00			3.897.129.881,00
8.1.02.01	Beban Barang	716.296.900,00			716.579.900,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	716.296.900,00			716.579.900,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.885.650,00			246.885.650,00
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.000.000,00			1.000.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.876.900,00	737000	454000	94.159.900,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.083.850,00			3.083.850,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.533.100,00			35.533.100,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.264.400,00			45.264.400,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.404.000,00			7.404.000,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	10.374.000,00			10.374.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	272.875.000,00			272.875.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	645.874.610,00			645.874.610,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	505.383.080,00			505.383.080,00
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00			1.200.000,00
8.1.02.02.01.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.370.000,00			46.370.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	428.950.000,00			428.950.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00			18.000.000,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.863.080,00			10.863.080,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	431.530,00			431.530,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	190.728,00			190.728,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	240.802,00			240.802,00

8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000,00		48.000.000,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.000.000,00		48.000.000,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00		5.000.000,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	5.000.000,00		5.000.000,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	87.060.000,00		87.060.000,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	34.460.000,00		34.460.000,00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	20.000.000,00		20.000.000,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	32.580.000,00		32.580.000,00
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan			0,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	59.150.000,00		59.150.000,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.500.000,00		48.500.000,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.500.000,00		48.500.000,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.650.000,00		10.650.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.650.000,00		10.650.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.475.525.371,00		2.475.525.371,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.525.371,00		2.475.525.371,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	288.315.371,00		288.315.371,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.187.210.000,00		2.187.210.000,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	15.470.440.706,00		15.452.576.960,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00		324.081.995,00
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00		324.081.995,00
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00		324.081.995,00
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		324081995	324.081.995,00
8.1.08.01.01.0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator			0,00
8.1.08.01.01.0005	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler			0,00
8.1.08.01.01.0006	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment			0,00
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment			0,00
8.1.08.01.01.0008	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment			0,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat			0,00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses			0,00
8.1.08.01.01.0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			0,00
8.1.08.01.01.0013	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Dredger			0,00
8.1.08.01.01.0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik			0,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set			0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa			0,00
8.1.08.01.01.0024	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor			0,00
8.1.08.01.01.0025	Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan			0,00
8.1.08.01.01.0028	Beban Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan			0,00
8.1.08.01.01.0030	Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan			0,00
8.1.08.01.01.0032	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering			0,00
8.1.08.01.01.0033	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen			0,00
8.1.08.01.01.0034	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya			0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00		0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			0,00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			0,00
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			0,00
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			0,00
8.1.08.01.02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel			0,00
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			0,00
8.1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			0,00
8.1.08.01.02.0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			0,00
8.1.08.01.02.0012	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor			0,00
8.1.08.01.02.0013	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya			0,00
8.1.08.01.02.0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang			0,00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			0,00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus			0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00		0,00
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			0,00

8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)				0,00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik				0,00
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service				0,00
8.1.08.01.03.0005	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu				0,00
8.1.08.01.03.0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus				0,00
8.1.08.01.03.0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las				0,00
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es				0,00
8.1.08.01.03.0011	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam				0,00
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)				0,00
8.1.08.01.03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)				0,00
8.1.08.01.03.0017	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja				0,00
8.1.08.01.03.0018	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi				0,00
8.1.08.01.03.0020	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu				0,00
8.1.08.01.03.0021	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting				0,00
8.1.08.01.03.0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam				0,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal				0,00
8.1.08.01.03.0027	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain				0,00
8.1.08.01.03.0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi				0,00
8.1.08.01.03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester				0,00
8.1.08.01.03.0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembandingan				0,00
8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain				0,00
8.1.08.01.03.0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara				0,00
8.1.08.01.03.0034	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara				0,00
8.1.08.01.03.0040	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam				0,00
8.1.08.01.03.0041	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan				0,00
8.1.08.01.03.0044	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya				0,00
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00			0,00
8.1.08.01.04.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				0,00
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak				0,00
8.1.08.01.04.0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen				0,00
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian				0,00
8.1.08.01.04.0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian				0,00
8.1.08.01.04.0006	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing				0,00
8.1.08.01.04.0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan				0,00
8.1.08.01.04.0009	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan				0,00
8.1.08.01.04.0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya				0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00			0,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Ketik				0,00
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah				0,00
8.1.08.01.05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)				0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor				0,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel				0,00
8.1.08.01.05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu				0,00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				0,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur				0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				0,00
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				0,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat				0,00

8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat				0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat				0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00			0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio				0,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film				0,00
8.1.08.01.06.0003	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar				0,00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak				0,00
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah				0,00
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya				0,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone				0,00
8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF				0,00
8.1.08.01.06.0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial				0,00
8.1.08.01.06.0013	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi				0,00
8.1.08.01.06.0015	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional				0,00
8.1.08.01.06.0016	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit				0,00
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya				0,00
8.1.08.01.06.0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW				0,00
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola				0,00
8.1.08.01.06.0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena				0,00
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena				0,00
8.1.08.01.06.0038	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder				0,00
8.1.08.01.06.0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment				0,00
8.1.08.01.06.0051	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF				0,00
8.1.08.01.06.0062	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan				0,00
8.1.08.01.06.0063	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio				0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga				0,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00			0,00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				0,00
8.1.08.01.07.0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi				0,00
8.1.08.01.07.0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana				0,00
8.1.08.01.07.0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah				0,00
8.1.08.01.07.0005	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan				0,00
8.1.08.01.07.0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT				0,00
8.1.08.01.07.0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata				0,00
8.1.08.01.07.0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam				0,00
8.1.08.01.07.0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak				0,00
8.1.08.01.07.0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik				0,00
8.1.08.01.07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis				0,00
8.1.08.01.07.0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)				0,00
8.1.08.01.07.0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung				0,00
8.1.08.01.07.0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic				0,00
8.1.08.01.07.0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy				0,00
8.1.08.01.07.0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah				0,00
8.1.08.01.07.0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi				0,00
8.1.08.01.07.0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir				0,00
8.1.08.01.07.0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin				0,00
8.1.08.01.07.0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat				0,00
8.1.08.01.07.0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi				0,00
8.1.08.01.07.0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU				0,00
8.1.08.01.07.0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU				0,00
8.1.08.01.07.0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung				0,00
8.1.08.01.07.0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi				0,00
8.1.08.01.07.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya				0,00
8.1.08.01.07.0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut				0,00

8.1.08.01.07.0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian				0,00
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga				0,00
8.1.08.01.07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya				0,00
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00			0,00
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Alir Teknik Penyehatan				0,00
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan				0,00
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia				0,00
8.1.08.01.08.0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi				0,00
8.1.08.01.08.0007	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan				0,00
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik				0,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum				0,00
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi				0,00
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi				0,00
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi				0,00
8.1.08.01.08.0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi				0,00
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film				0,00
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan				0,00
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi				0,00
8.1.08.01.08.0020	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika				0,00
8.1.08.01.08.0026	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola				0,00
8.1.08.01.08.0027	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi				0,00
8.1.08.01.08.0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas				0,00
8.1.08.01.08.0034	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil				0,00
8.1.08.01.08.0035	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil				0,00
8.1.08.01.08.0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik				0,00
8.1.08.01.08.0038	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik				0,00
8.1.08.01.08.0039	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik				0,00
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa				0,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian				0,00
8.1.08.01.08.0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas				0,00
8.1.08.01.08.0045	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi				0,00
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan				0,00
8.1.08.01.08.0047	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan				0,00
8.1.08.01.08.0048	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi				0,00
8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika				0,00
8.1.08.01.08.0050	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang				0,00
8.1.08.01.08.0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia				0,00
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri				0,00
8.1.08.01.08.0054	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan				0,00
8.1.08.01.08.0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis				0,00

8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain				0,00
8.1.08.01.08.0061	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi				0,00
8.1.08.01.08.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya				0,00
8.1.08.01.08.0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument				0,00
8.1.08.01.08.0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool				0,00
8.1.08.01.08.0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils				0,00
8.1.08.01.08.0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment				0,00
8.1.08.01.08.0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia				0,00
8.1.08.01.08.0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika				0,00
8.1.08.01.08.0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar				0,00
8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan				0,00
8.1.08.01.08.0075	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah				0,00
8.1.08.01.08.0076	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas				0,00
8.1.08.01.08.0077	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS				0,00
8.1.08.01.08.0078	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama				0,00
8.1.08.01.08.0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan				0,00
8.1.08.01.08.0080	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian				0,00
8.1.08.01.08.0081	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga				0,00
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN				0,00
8.1.08.01.08.0085	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK				0,00
8.1.08.01.08.0086	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya				0,00
8.1.08.01.08.0088	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic				0,00
8.1.08.01.08.0089	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System				0,00
8.1.08.01.08.0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display				0,00
8.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply				0,00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device				0,00
8.1.08.01.08.0096	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya				0,00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0,00			0,00
8.1.08.01.09.0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain				0,00
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan				0,00
8.1.08.01.09.0012	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api				0,00
8.1.08.01.09.0013	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)				0,00
8.1.08.01.09.0014	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia				0,00
8.1.08.01.09.0019	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura				0,00
8.1.08.01.09.0020	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlindungan Teror)				0,00
8.1.08.01.09.0022	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas				0,00
8.1.08.01.09.0023	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Reserse				0,00
8.1.08.01.09.0024	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian				0,00
8.1.08.01.09.0025	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Daktiloskopi				0,00
8.1.08.01.09.0026	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik				0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00			0,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan				0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer				0,00
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				0,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe				0,00

8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer			0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			0,00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			0,00
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			0,00
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00		0,00
8.1.08.01.13.0002	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran			0,00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00		0,00
8.1.08.01.15.0004	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman			0,00
8.1.08.01.15.0010	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong			0,00
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian			0,00
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air			0,00
8.1.08.01.15.0019	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faspelkrik			0,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00		0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid			0,00
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0,00		0,00
8.1.08.01.18.0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar			0,00
8.1.08.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			0,00
8.1.08.01.18.0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			0,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00		0,00
8.1.08.01.19.0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik			0,00
8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan			0,00
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam			0,00
8.1.08.01.19.0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air			0,00
8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya			0,00
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	0,00		324.081.995,00
				0,00
	JUMLAH BEBAN	15.470.440.706,00		15.776.658.955,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-15.470.440.706,00		-15.776.658.955,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00		0,00
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00		0,00
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00		0,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00		0,00
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO			0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00		0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00		0,00
				0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-15.470.440.706,00		-15.776.658.955,00
POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0		0
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0		0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-15.470.440.706,00		-15.776.658.955,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

NO	Uraian	LPE 2024	PENYESUAIAN		LPE 2023
			D	K	
1	EKUITAS AWAL	507.208.013,00			639.073.674,44
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(15.776.658.955,00)			(14.521.864.427,44)
3	RK PPKD	15.682.319.106,00			14.389.998.766,00
4	RK SKPD				
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-			-
5.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-			-
	Persediaan Bahan Pakai Habis	-			-
	Persediaan Bahan/ Material	-			-
	Persediaan Barang Lainnya	-			-
5.2	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-			-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-			-
	Tanah	-			-
	Peralatan dan Mesin	-			-
	Gedung dan Bangunan	-			-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Aset Tetap Lainnya	-			-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-			-
	Peralatan dan Mesin	-			-
	Gedung dan Bangunan	-			-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
	Akumulasi Penyusutan	-			-
5.2	LAIN-LAIN	-			-
	Koreksi Nilai Kas	-			-
	Kas di Kas Daerah	-			-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
	Kas di BLUD	-			-
	kas lainnya	-			-
	Setara Kas	-			-
	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-			-
	Kas di Bendahara BOS	-			-
	Koreksi Nilai Piutang	-			-
	Piutang Pajak	-			-
	Penyisihan Piutang Pajak	-			-
	Piutang Retribusi	-			-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-			-
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekay Daerah	-			-

	Piutang Lain2 PAD	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-			
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-			
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Piutang TGR	-			
	Penyisihan Piutang TGR	-			
	Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Penyisihan Piutang Lain-lain Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-			-
	Jasa dibayar dimuka	-			
	Barang dibayar dimuka	-			

	Koreksi Nilai Investasi	-			-
	Investasi Permanen	-			
	Investasi Nonpermanen	-			
	Penyisihan Investasi Non Permanen	-			
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-			-
	Tagihan Jangka Panjang -TGR	-			
	Penyisihan TGR	-			
	Kemitraan dengan Pihak III	-			
	Aset Tidak Berwujud	-			
	Aset dalam proses TGR	-			
	aset rusak berat	-			
	Akumulasi penyusutan	-			
	Koreksi Nilai Kewajiban	-			-
	Utang PFK	-			
	Utang Bunga	-			
	Bagian Utang Jangka Panjang	-			
	Pendapatan diterima dimuka	-			
	Utang Barang dan Jasa	-			
	Utang Belanja Pegawai	-			
	Utang Belanja Modal	-			
	Utang bansos	-			
	Utang Transfer	-			
	Bagian Lancar Utang Jk Pjg	-			
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-			
	Koreksi Nilai Aset Non APBD				
6	EQUITAS AKHIR	412.868.164,00			507.208.013,00